KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM
NOMOR : 149/PSDKP.2/TU.140/I/2025

Yth.	:	Direktur Jenderal PSDKP
Dari	:	Direktur Pengendalian Operasi Armada
Hal	:	Laporan Kinerja Tahun 2024 Direktorat Pengendalian Operasi Armada
Lampiran	:	1 (satu) paket dokumen
Tanggal	:	20 Januari 2024

Sehubungan dengan telah dilakukan pengukuran kinerja pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada sebagai salah satu upaya implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup Ditjen PSDKP, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Tahun 2024 Direktorat Pengendalian Operasi Armada.

Demikian kami sampaikan, atas persetujuan dan arahan Bapak Direktur Jenderal PSDKP diucapkan terima kasih.

Ditandatangani
Secara Elektronik

Saiful Umam

Tembusan:
Sekretaris Ditjen PSDKP

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA

TAHUN 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Kata Pengantar

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengendalian Operasi Armada Tahun 2024 disusun sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini menjadi sarana pertanggung jawaban dan akuntabilitas atas pencapaian kinerja Direktorat Pengendalian Operasi Armada pada tahun 2024 .

LKj ini berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja secara kuantitatif, sekaligus menjadi alat kendali dan pendorong peningkatan kinerja di setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Pengendalian Operasi Armada. Sejalan dengan reformasi birokrasi, Direktorat Pengendalian Operasi Armada telah mengimplementasikan metode kombinasi Balanced Scorecard (BSC) dan Kerangka Logis (Logical Framework) untuk manajemen kinerja. Dengan penerapan BSC, pencapaian Sasaran Strategis Direktorat diukur berdasarkan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Direktorat Pengendalian Operasi Armada Tahun 2024.

Saiful Umum
Direktur Pengendalian Operasi Armada

Pencapaian IKU Direktorat Pengendalian Operasi Armada Tahun 2024 telah diupayakan melalui pelaksanaan progam Pemantauan dan Operasi Armada dengan 5 (lima) output/kegiatan utama, yaitu: (1) Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP; (2) Operasional Pusat Pengendalian; (3) Penyediaan Logistik dan Pengawakan Kapal Pengawas; (4) Operasional Armada dan; (5) Perawatan Kapal Pengawas. Sampai dengan Tahun 2024 Direktorat Pengendalian Operasi Armada telah berhasil mencapai beberapa kinerja strategis yang menjadi target pencapaian khususnya yang menunjang pencapaian kinerja level Eselon I dan Menteri, serta tentunya kegiatan yang menjadi perhatian.

Akhir kata, diharapkan laporan ini

dapat memberikan manfaat bagi perbaikan birokrasi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas Direktorat Pengendalian Operasi Armada untuk periode Tahun 2024. Keberadaan laporan ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga sebagai upaya perbaikan berkelanjutan dengan melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja untuk tahun-tahun mendatang, agar dapat mencapai hasil yang lebih baik

Jakarta, 20 Januari 2024
Direktur Pengendalian Operasi Armada

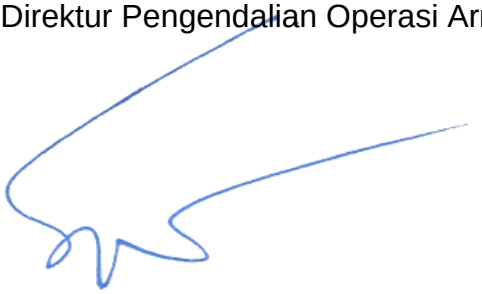

Saiful Umam, S.St.Pi, M.M

Tim Penyusun

Penanggungjawab:

Direktur Pengendalian Operasi Armada

Koordinator Pelaporan Direktorat POA:

1. **Ema Velayati, S.St.Pi.**
2. **Ikrom Bungsu, S.Pi.**
3. **Vandra Anggriawan, S.H.**
4. **Hamzah Abdulloh, A.Md.**

Kontributor Pelaporan Direktorat POA:

1. **Arseto Rahadyawan, S.T.**
2. **Edwin Haryanto, S.Tr.Pi.**
3. **Bilmantasya Al Fattha, S.T.**
4. **Nova Roy Yohana, S.Sos.**
5. **Noval Reza Jaya, A.Md.**
6. **Husain, S.Kom.**

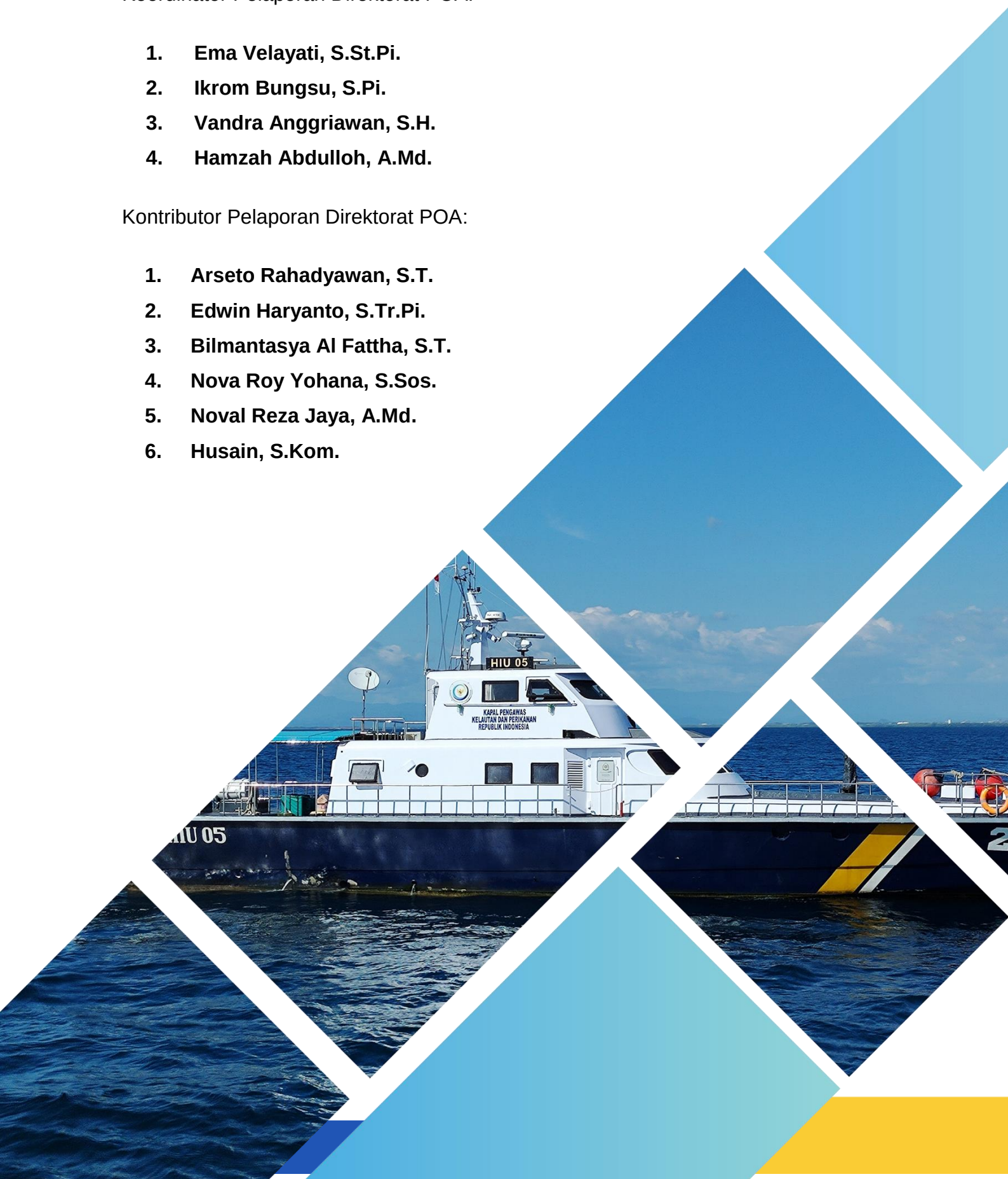

Daftar Isi

Kata Pengantar 2

Tim Penyusun 4

Daftar Isi 5

Daftar Tabel 6

Daftar Gambar 7

Daftar Lampiran 9

Ringkasan Eksekutif 10

BAB I 12

Pendahuluan 12

Latar Belakang 13

Maksud dan Tujuan 15

Isu Strategis Tahun 2024 15

Tugas dan Fungsi Direktorat POA 16

Sistematika Penyajian 18

BAB II 19

Perencanaan Kinerja 19

RENSTRA DITJEN PSDKP TAHUN 2020-2024 20

Perjanjian Kinerja Dit. POA 23

ALOKASI ANGGARAN 25

BAB III 27

Akuntabilitas Kinerja 27

Pengukuran Capaian Kinerja 28

Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja 29

Realisasi Anggaran 74

BAB IV 78

Penutup 78

A. Kesimpulan 79

B. Rekomendasi 79

LAMPIRAN 80

Daftar Tabel

Tabel 1. Indikator Kinerja Direktorat Pengendalian Operasi Armada 23
Tabel 2. Komponen Perhitungan IKU 2..... 33
Tabel 3. Rincian analisis pelanggaran periode Januari s.d Desember 2024..... 34
Tabel 4. Pemantauan Kapal di Kawasan Konservasi Januari-Desember 2024 35
Tabel 5. Daftar Keaktifan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Tahun 2024 37
Tabel 6. Data Sebaran Kapal Perikanan sebagai Bahan Operasi Tahun 2024..... 37
Tabel 7. Pelaksanaan Operasi Pesawat Patroli Tahun 2024 43
Tabel 8. Hasil Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Ditjen PSDKP.... 48
Tabel 9. Target dan Realisasi IKU 7 Periode TW IV Tahun 2024 49
Tabel 10. Hasil Penilaian oleh BKI Pada Tahun 2024..... 55
Tabel 11. Rincian Nilai Supervisi Pembangunan Prasarana di UPT 57
Tabel 12. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA TW IV Tahun 2024.... 74

Daftar Gambar

Gambar 1.Target dan realisasi capaian kinerja Dit. POA 2024 11
Gambar 2 Struktur Organisasi Direktorat POA 16
Gambar 3. Tangkapan Layar Capaian Kinerja Direktorat POA Tahun 2024 28
Gambar 4. Komponen nilai supervisi pembinaan Pokmaswas 30
Gambar 5. Target dan Realisasi IKU-1 TW IV Tahun 2024 31
Gambar 6. Target dan Realisasi IKU-2 TW IV Tahun 2024 33
Gambar 7. Target dan Realisasi IKU 3 Periode TW IV Tahun 2024 40
Gambar 8. Tangkapan Layar Aplikasi Si Susan KKP 40
Gambar 9. Target dan Realisasi IKU 4 Periode TW IV Tahun 2024 41
Gambar 10. Target dan Realisasi IKU 5 Periode TW IV Tahun 2024 42
Gambar 11. Pola Operasi Armada Pengawasan Terintegrasi 43
Gambar 12. Hasil Operasi Pesawat Patroli 46
Gambar 13. Rincian capaian IKU 6 Direktorat POA TW IV Tahun 2024 47
Gambar 14. Kegiatan Menghentikan, Memeriksa dan Menahan (HENRIKHAN) oleh Kapal Pengawas 47
Gambar 15. Target dan Realisasi IKU 7 Periode TW IV Tahun 2024 49
Gambar 16. Pengisian Bahan Bakar Minyak KP Orca 01 dan Pemenuhan Minyak Pelumas KP. Paus 01 50
Gambar 17. Target dan Realisasi IKU 8 Periode TW IV Tahun 2024 51
Gambar 18. Kegiatan Sertifikat Keahlian Awak Kapal Pengawas dan kegiatan 51
Gambar 19. Target dan Realisasi IKU 9 Periode TW IV Tahun 2024 52
Gambar 20. Target dan Realisasi IKU 10 Periode TW IV Tahun 2024 53
Gambar 21. Target dan Realisasi IKU 11 Periode TW IV Tahun 2024 54
Gambar 22. Target dan realisasi IKU-12 periode TW IV Tahun 2024 56
Gambar 23. Target dan realisasi IKU-13 periode TW IV Tahun 2024 58
Gambar 24. Target dan realisasi IKU 14 periode Tahun 2024 59
Gambar 25. Target dan realisasi IKU-15 periode TW IV Tahun 2024 60
Gambar 26. Target dan Realisasi IKU 16 Periode TW IV Tahun 2024 62
Gambar 27. Target dan Realisasi IKU-17 Periode TW IV Tahun 2024 63
Gambar 28. Target dan realisasi IKU 18 periode TW IV Tahun 2024 64
Gambar 29. Target dan realisasi IKU 19 periode TW IV Tahun 2024 65
Gambar 30. Rincian target dan realisasi IKU-20 periode TW IV Tahun 2024 65
Gambar 31. Target dan realisasi IKU 21 periode TW IV Tahun 2024 67
Gambar 32. Target dan realisasi IKU 22 periode TW IV Tahun 2024 68

Gambar 33. Capaian MP Direktorat POA Triwulan IV 69
Gambar 34. Target dan realisasi IKU 23 periode TW IV Tahun 2024 69
Gambar 35. Target dan realisasi IKU-24 periode TW IV Tahun 2024 70
Gambar 36. Target dan realisasi IKU-25 periode TW IV Tahun 2024 71
Gambar 37. Target dan realisasi IKU-26 periode TW IV Tahun 2024 72
Gambar 38. Daftar penghargaan baik dari KKP maupun Instansi Luar KKP 77

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 81

Lampiran 2 Rincian Hasil Operasi Pesawat Patroli 84

Lampiran 3 Daftar kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas 92

Ringkasan Eksekutif

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) periode Tahun 2024. Laporan Kinerja tersebut merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Direktorat POA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Peta Strategis Direktorat POA tahun 2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tahun 2020-2024.

Sejalan dengan upaya pencapaian Visi dan Misi dimaksud. Direktorat POA telah menetapkan 5 Sasaran Kegiatan dan 26 Indikator Kinerja (IK). Capaian kinerja Direktorat POA untuk Tahun 2024 mencapai 110,83% mengalami penurunan sebesar 0,32% dari capaian tahun 2023 sebesar 111,15%. Dalam hal pelaksanaan anggaran, Direktorat POA telah melaksanakan 9 Rincian Output (RO) yang tertuang dalam RKA-K/L Satker Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2024. Dengan Pagu Direktorat POA sebesar Rp 445.134.101.000 (empat ratus empat puluh lima miliar seratus tiga puluh empat juta seratus satu ribu rupiah).

Realisasi anggaran Direktorat POA Tahun 2024 sebesar Rp 362.186.170.641 (tiga ratus enam puluh dua miliar seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) atau sebesar 89,33% dari Pagu anggaran efektif karena pada tahun 2024 terdapat blokir anggaran nasional (*automatic adjustment*) yang menjadi kebijakan nasional dan perkembangan pelaksanaan proyek Pinjaman Luar Negeri (PLN) di KKP Tahun 2024 yang belum mendapatkan persetujuan *loan agreement* serta sisa anggaran PNBP SDA yang tidak dapat direalisasikan secara optimal (target PNPB SDA Diten Perikanan Tangkap sampai dengan bulan awal bulan Desember belum tercapai) .

Dalam merealisasikan anggaran, Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) berpegang teguh pada prinsip *budget follow program* dengan memastikan efektivitas dan efisiensi dalam setiap

alokasi belanja. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap rupiah yang digunakan harus secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan di lingkup Direktorat POA. Sebagai langkah strategis untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi dan menjamin terpenuhinya target setiap indikator kinerja, Direktorat POA secara konsisten melaksanakan monitoring dan evaluasi (*monev*) secara berkala. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai forum pengawasan, tetapi juga sebagai wadah untuk mengidentifikasi kendala, menganalisis akar masalah, dan merumuskan solusi yang terintegrasi.Pendekatan ini memastikan bahwa pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal, sekaligus memitigasi risiko ketidaktercapaian target akibat hambatan operasional maupun teknis yang mungkin muncul selama proses pelaksanaan kegiatan Direktorat POA. Realisasi pencapaian indikator kinerja Direktorat POA periode Tahun 2024, sebagai berikut:

Gambar 1.Target dan realisasi capaian kinerja Dit. POA 2024

BAB I
Pendahuluan

Latar Belakang

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan elemen penting dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah memastikan bahwa setiap pelaku usaha mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pilar pengawasan ini semakin kokoh dengan kewenangan yang dimiliki, yaitu mencakup pemantauan dan pengawasan, penegakan hukum, serta pemberian sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan.

Keberhasilan pengawasan ini tidak terlepas dari peran dan kinerja Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) sebagai salah satu unit kerja strategis. Direktorat POA bertanggung jawab atas sejumlah tugas utama, antara lain penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, penyiapan logistik kapal pengawas, pengoperasian kapal pengawas dan pesawat patroli, pemantauan melalui pusat pengendalian, serta pemeliharaan dan perawatan armada kapal pengawas. Dalam pelaksanaannya, ukuran keberhasilan Direktorat POA telah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang spesifik dan terukur.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, akuntabel, efektif, dan efisien, Direktorat POA menerapkan manajemen kinerja yang menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, hingga evaluasi hasil kegiatan. Sebagai institusi pemerintah, Direktorat POA juga wajib menetapkan target kinerja serta melaksanakan pengukuran sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat POA untuk Tahun 2024 telah disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik sekaligus alat evaluasi kinerja di masa mendatang. Dalam untuk meningkatkan kualitas laporan ini, capaian kinerja Direktorat POA selama tahun 2024 diuraikan secara terperinci, mencerminkan komitmen terhadap

pencapaian dan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan pengendalian operasi armada.

Direktorat POA terus berupaya memperkuat pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sebagai bagian dari kontribusi strategisnya dalam mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dengan adanya laporan ini, diharapkan terwujud evaluasi yang konstruktif, memberikan umpan balik yang bermanfaat, sekaligus memperkokoh akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat.

Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Direktorat POA Tahun 2024 disusun dengan tujuan yaitu:

1. Penyampaian pertanggungjawaban kinerja Direktorat POA kepada seluruh stakeholder dan masyarakat kelautan dan perikanan.
2. Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Direktorat POA sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Isu Strategis Tahun 2024

Isu strategis yang menjadi tantangan Direktorat POA dalam pemantauan, pengendalian dan operasi armada, antara lain:

1. Praktik *IUU fishing* yang masih marak terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII). Praktik penangkapan ikan ilegal seringkali diikuti dengan aktifitas perbudakan *(slavery)* dan perdagangan orang *(people smuggling)* diperlukan koordinasi dan sinergitas dari semua pihak, antara lain: TNI-Angkatan Laut, POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-Ditjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan-Ditjen PSDKP, Kementerian Keuangan-Ditjen Bea Cukai, Badan Keamanan Laut (Bakamla)
2. Pemeriksaan terhadap pemanfaatan ruang laut, kawasan konservasi, pesisir pulau-pulau kecil, pengambilan pasir laut ilegal, dan pencemaran belum optimal dilakukan oleh kapal pengawas.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan baik berupa armada operasi (kapal pengawas dan speedboat) maupun prasarana perkantoran dan fasilitas penunjang operasi pengawasan sdkp lainnya yang masih jauh dari kondisi ideal. Modernisasi armada pengawasan juga menjadi kebutuhan, saat ini armada kapal pengawas 60% sudah berumur diatas 10 tahun dengan daya jelajah yang terbatas dan kemampuan serta kehandalan dalam melakukan pengawasan di laut juga sangat terbatas sehingga perlu untuk melakukan peremajaan kapal pengawas yang baru dan lebih modern.
4. Perkembangan harga BBM dunia terus mengalami kenaikan, kondisi ini mengakibatkan hari operasi kapal pengawas terkoreksi dan menjadi berkurang dari yang direncanakan sehingga dengan kemampuan frekuensi operasi kapal pengawas tersebut maka pengawasan dilaut perlu diintegrasikan dengan VMS atau dengan operasi udara.

Tugas dan Fungsi Direktorat POA

Tugas Direktorat Pengendalian Operasi Armada berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5/PERMEN- KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Direktorat POA dipimpin oleh seorang Direktur dengan dibantu oleh 6 (enam) Ketua Tim Kerja yaitu: (1) Tim Kerja Prasarana dan Sarana, (2) Tim Kerja Pengendalian Sistem Informasi dan Intelijen, (3) Pengawakan dan Logistik, (4) Pengoperasian Kapal Pengawas dan Pesawat Patroli (5) Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas, (6) Dukungan Manajerial. Struktur Organisasi sebagaimana Gambar 1.

Gambar 2 *Struktur Organisasi Direktorat POA*

Adapun Direktorat Pengendalian Operasi Armada memiliki beberapa fungsi sebagai berikut

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada

1. pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas;
2. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas;
3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan

evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas; dan

5. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengendalian Operasi Armada.

Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat POA secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Direktorat POA, Ditjen. PSDKP tahun 2024 serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja
Menguraikan rencana strategis Ditjen. PSDKP untuk periode 2020- 2024 dan perjanjian kinerja Direktorat POA tahun 2024.

Bab IV Akuntabilitas Kinerja
Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan selama tahun 2024.

Bab IV Penutup
Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Direktorat POA, Ditjen. PSDKP periode Tahun 2024 dan merekomendasikan perbaikan kinerja di masa mendatang

BAB II

Perencanaan Kinerja

RENSTRA DITJEN PSDKP TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Koordinator dan Sub Koordinator lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

- Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
- Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
- Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
- Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP

Berdasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:

- Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP
- Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
- Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP
- Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP

2. Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
   - Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya)
   - Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai
   - Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional
   - Mengembangkan kelembagaan pengawasan
3. Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
   - Operasi bersama pengawasan di laut Pertukaran data
   - Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
   - Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan
4. Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
   - Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat
   - Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan IUU fishing
   - Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, represif (ultimum remedium).
   - Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan
5. Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
   - Meningkatkan kesadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
   - Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain

- Optimalisasi peranserta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS
- Menanamkan pengetahuan pengelolaanSDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar” Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”
- Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar
- Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil pada tahun 2024 Direktorat POA mempunyai 5 (lima) sasaran kegiatan dan 26 (dua puluh enam) IKU, yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja sebagaimana terdapat pada lampiran 1. Sepanjang Tahun 2024 dokumen perjanjian kinerja terdapat perubahan atau revisi yang disebabkan oleh adanya pergantian pejabat difinitif dan perubahan nomenklatur organisasi serta adanya blokir anggaran PHLN serta sisa pemanfataan PNPB SDA untuk operasi kapal pengawas. Adapun Rincian Indikator Kinerja yang menjadi target pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Kinerja Direktorat Pengendalian Operasi Armada

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas (Nilai)	81
2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat	2	Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (Indeks)	81
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Indeks)	81
		4	Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Bidang Pemantauan SDKP (%)	80
3	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	5	Indeks kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	94
		6	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91
		7	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
		8	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (Indeks)	79
		9	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Operasi Armada Pengawasan SDKP (%)	100
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketetuan	10	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	0,5
		11	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Indeks)	100
		12	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Nilai)	81
		13	Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (Nilai)	81
		1	Persentase Penyelesaian	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		4	Rancangan NSPK Bidang pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP (%)	
		15	Inovasi yang dihasilkan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada (Inovasi)	1
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA	16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA (%)	100
		17	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	82
		18	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA (Nilai)	84
		19	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		20	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70
		21	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA (%)	87,5*
		22	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	94
		23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA (%)	80
		24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA (%)	80
		25	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat POA (Nilai)	75
		26	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (Nilai)	70

* Target Semula 99,4%

ALOKASI ANGGARAN

Dalam mendukung Indikator Kinerja tersebut, dialokasikan anggaran dalam merealisasikan Rincian Output Lingkup Direktorat POA ditabulasikan sebagai berikut:

RINCIAN OUTPUT	VOLUME RO	ANGGARAN
Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	5150 Produk	2,587,650,000
NSPK Pemantauan dan Operasi Armada	2 NSPK	500,000,000
Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang Dipantau	3 Laporan	1,000,000,000
Operasional Pembinaan POKMASWAS yang Dipantau	34 Laporan	1,000,000,000
Operasi Kapal Pengawas	92 Hari Operasi	327,299,298,000
Operasi Pesawat Patroli	170 Operasi	50,000,000,000
Kapal Pengawas	10 Unit	30,000,000,000
Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	12 Unit	26,584,803,000
Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	1 Unit	6,162,350,000
TOTAL		**445,134,101,000**

Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan secara sistematis dengan berpedoman pada formula penghitungan yang ditetapkan dalam dokumen Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja. Proses ini bertujuan untuk mengukur secara objektif kesesuaian antara realisasi capaian dan target yang telah ditentukan. Pengukuran dilakukan secara berkala, baik pada periode triwulanan maupun tahunan, guna memantau progres pelaksanaan kinerja sekaligus mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Hasil pengukuran kinerja ini tidak hanya menjadi alat evaluasi internal tetapi juga menjadi bagian dari pelaporan yang transparan kepada para pemangku kepentingan. Seluruh data kinerja yang terukur diunggah melalui *Sistem Aplikasi Kinerjaku*, sebuah platform berbasis teknologi informasi yang dapat diakses melalui laman http://kinerjaku.kkp.go.id. Platform ini dirancang untuk mendukung pengelolaan data kinerja yang akurat, cepat, dan terintegrasi, sehingga memudahkan proses analisis dan pengambilan keputusan berbasis data.

Selain itu, hasil pengukuran ini dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj), yang tidak hanya memuat data realisasi capaian, tetapi juga disertai dengan analisis komprehensif serta pembahasan yang mendalam. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk periode mendatang.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Direktorat POA

Pengukuran capaian kinerja Direktorat POA Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh nilai capaian kinerja Direktorat POA sebesar 110,83% dengan capaian indikator Nilai Kinerja Organisasi (NKO) berwarna BIRU dengan kategori ISTIMEWA. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana disajikan pada tabel Capaian Kinerja Organisasi berikut:

Gambar 3. Tangkapan Layar Capaian Kinerja Direktorat POA Tahun 2024

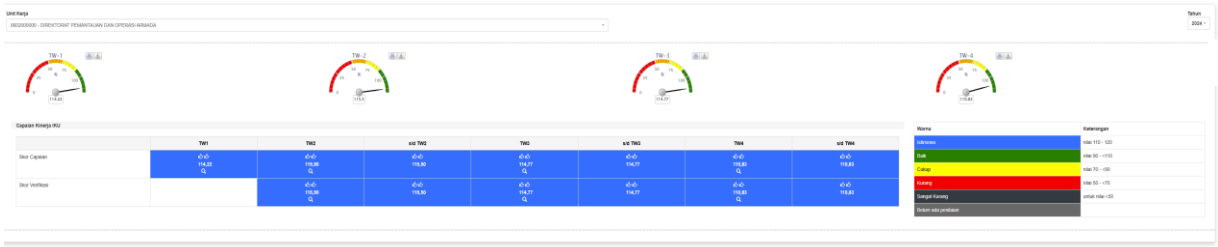

Sumber: *kinerjaku.KKP.go.id, Oktober 2024*

SASARAN KEGIATAN 1

TERSELENGGARANYA SISTEM PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif” didukung oleh satu Indikator Kinerja Utama, yaitu: "Nilai Supervisi Pembinaan Pokmaswas."

1 Nilai Supervisi Pembinaan Pokmaswas

Sistem pengawasan kelautan dan perikanan berbasis masyarakat adalah pendekatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan melibatkan keikutsertaan dan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini mengandalkan peran serta masyarakat dalam memantau lingkungan mereka, mendeteksi potensi masalah atau ancaman, serta berkontribusi dalam penanganan situasi yang mungkin mengganggu keamanan dan ketertiban.

Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai capaian kegiatan supervisi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam kegiatan pembinaan Pokmaswas untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (Sismaswas) secara baik dan efektif. Supervisi oleh Satker Pusat untuk kegiatan pembinaan Pokmaswas yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi perlu dilakukan karena beberapa alasan berikut:

- Koordinasi dan Pengawasan, Supervisi oleh Satker Pusat memungkinkan adanya koordinasi dan pengawasan yang efektif terhadap kegiatan pembinaan Pokmaswas oleh Pemda Provinsi. Dengan adanya supervisi, Satker Pusat dapat memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.
- Peningkatan Kualitas, Supervisi dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pembinaan Pokmaswas. Satker Pusat dapat memberikan arahan, bimbingan, dan saran yang diperlukan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kegiatan pembinaan
- Monitoring dan Evaluasi, Melalui supervisi, Satker Pusat dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan dan indikator kinerja tercapai dengan baik.
- Pengalaman dan Pengetahuan, Satker Pusat memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam pembinaan Pokmaswas. Dengan melakukan supervisi, mereka dapat berbagi pengalaman terbaik dan memberikan pemahaman

yang lebih mendalam kepada Pemda Provinsi dalam melaksanakan kegiatan pembinaan.

Dengan melakukan supervisi oleh Satker Pusat, diharapkan bahwa kegiatan pembinaan Pokmaswas oleh Pemda Provinsi dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas diperoleh dari kualitas kegiatan Direktorat Pengendalian Operasi Armada dalam melakukan supervisi terhadap pembinaan Pokmaswas yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Hasil pembinaan tersebut wajib dikirimkan dalam bentuk laporan pembinaan Pokmaswas dengan merujuk pada Komponen kegiatan yang dinilai antara lain:

Gambar 4. Komponen nilai supervisi pembinaan Pokmaswas

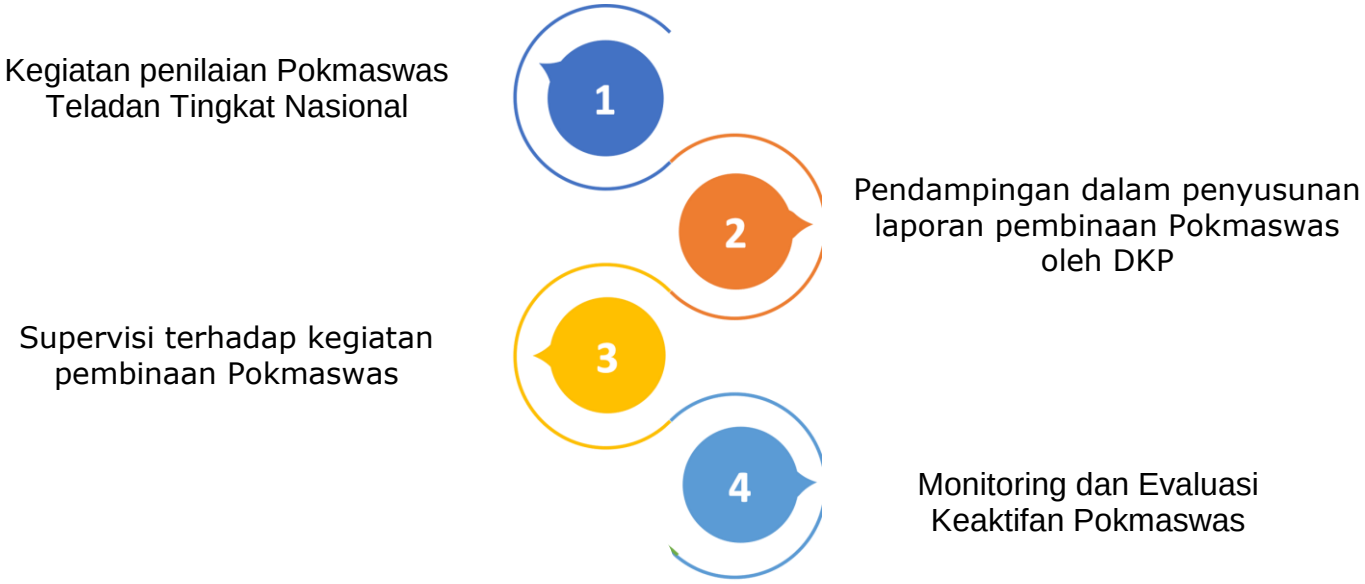

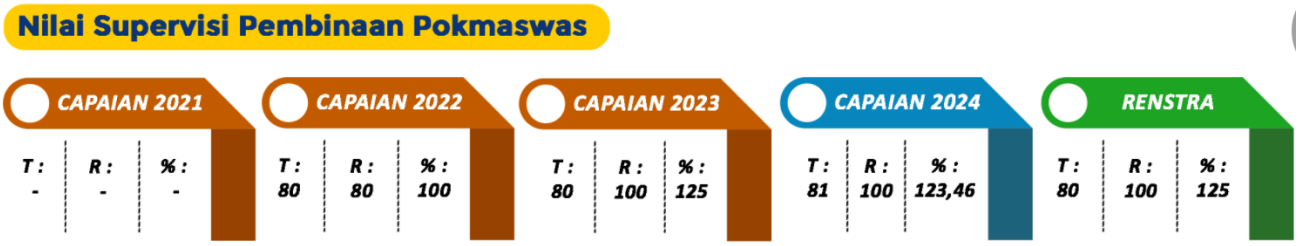

Gambar 5. Target dan Realisasi IKU-1 TW IV Tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas, Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Triwulan IV Tahun 2024 mencapai 100%. Pencapaian ini merupakan hasil dari berbagai upaya pendampingan yang dilakukan terhadap setiap provinsi, baik secara daring maupun luring. Pendampingan daring dilakukan melalui komunikasi menggunakan WhatsApp, panggilan telepon, dan platform Zoom, sedangkan pendampingan luring dilakukan melalui kunjungan dinas ke lokasi pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) atau kantor Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat provinsi.

Indikator kinerja ini dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya realisasi sama dengan Tahun 2023 dan 125% lebih tinggi dibandingkan dengan target dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024.

Selama Tahun 2024, Direktorat POA menerapkan beberapa strategi agar target IKU Nilai Supervisi Pembinaan Pokmaswas tercapai antara lain:

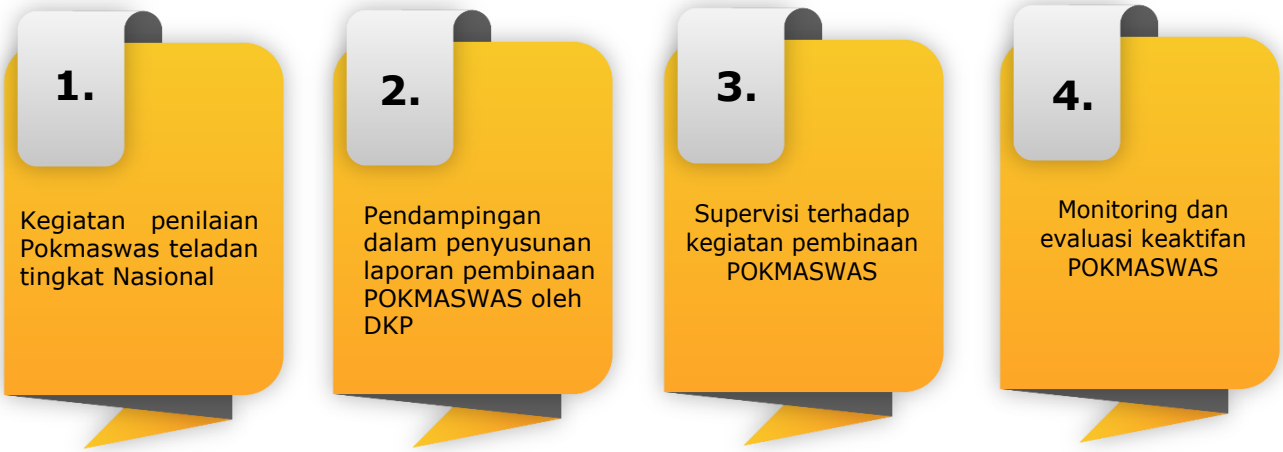

Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) berperan untuk membantu tugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota. Berdasarkan Target Pembinaan Pokmaswas Tahun Anggaran 2024 yang di berikan kepada 12 UPT lingkup Ditjen PSDKP dan DKP Provinsi. Dari kualitas pembinaan dimaksud, diharapkan keaktifan Pokmaswas semakin meningkat. Pada tahun 2024, 12 UPT Ditjen PSKDP ditargetkan 55 kelompok dan DKP Provinsi sejumlah 1.055 kelompok. Sampai dengan periode Desember 2024 sebanyak 55 kelompok yang melaporkan keaktifan pokmaswas dari total 55 kelompok UPT Ditjen PSDKP dan sebanyak 1.210

kelompok yang melaporkan keaktifan pokmaswas dari total 1.055 kelompok DKP Provinsi

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 1 ini sebesar Rp1.000.000.000,- hingga TW IV tahun 2024 dan telah terealisasi sebesar Rp 908.825.056,- atau 90.88 % dari alokasi anggaran dan terdapat pagu blokir sebesar Rp88.988.000,-

SASARAN KEGIATAN 2

TERSELENGGARANYA SISTEM PEMANTAUAN SDKP YANG AKURAT

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Sistem Pemantauan SDKP yang Akurat" didukung oleh 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

2 Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP

Indikator Kinerja "Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP" bertujuan untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Direktorat POA memastikan pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan kepada user pengguna hasil analisis dilakukan secara akuntabel. Analisis yang diberikan bersumber dari data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), Ditjen PSDKP. Rincian capaian IKU 2 Direktorat POA periode Tahun 2024 ditabulasikan pada tabel berikut:

Gambar 6. Target dan Realisasi IKU-2 TW IV Tahun 2024

Berdasarkan gambar di atas, target untuk IKU 2 dapat dicapai secara maksimal, bahkan melampaui target. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023, capaian pada tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023 realisasi indeks 100 dengan persentase 123%. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu indeks 80, indikator ini telah tercapai lebih dari indeks 94% untuk triwulan IV dan akan terus meningkat pada triwulan berikutnya. Adapun indeks 100 didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2. Komponen Perhitungan IKU 2

No	Indikator	Bulan												Bobot	Perhitungan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Indikasi Pelanggaran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40	40
2	Analisis Kapal di Kawasan Konservasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	20
3	Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	20
4	Data untuk Ops Kapal Pengawas/Airborne Surveillance	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	20
	Indeks														100

Berdasarkan tabel 2 diatas, angka 1 pada capaian bulanan tersebut menunjukan tercapainya pemenuhan data realisasi perkomponen pada IKU 2.

Indikator ini dipengaruhi oleh 4 sub indikator yaitu: Indikasi Pelanggaran, Analisis Kapal di Kawasan Konservasi, Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dan Data untuk Operasi Kapal Pengawas/Airborne Surveillance

1. Indikasi Pelanggaran

Indikasi pelanggaran adalah sebuah analisis yang dilakukan terhadap kapal- kapal ikan yang terdaftar di dalam sistem pemantauan kapal perikanan berkaitan dengan berbagai indikasi pelanggaran pengelolaan sumber daya perikanan.

Pusat Pemantauan Kapal Perikanan PSDKP memantau seluruh kapal perikanan yang terpasang transmiter SPKP. Kepatuhan kapal perikanan dalam operasional penangkapan ikan dimonitor melalui aplikasi *Integrated Maritime Intelligent Platform*, (IMIP). IMIP mendeteksi secara otomatis seluruh kapal perikanan yang terindikasi beroperasi tidak sesuai dengan ijin yang dimiliki. Jenis-jenis indikasi pelanggaran antara lain pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI), pelanggaran pelabuhan pangkalan, pelanggaran jalur penangkapan ikan, beroperasi di laut lepas tanpa ijin, beroperasi di perairan negara lain tanpa ijin (*poaching*), alih muatan (transhipment) yang tidak sesuai dengan perijinan, beroperasi di kawasan konservasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilarang. Untuk diketahui samapai dengan periode TW IV Tahun 2024, Pusdal PSDKP telah menerbitkan analisis indikasi pelanggaran kapal perikanan dengan rincian sebagaimana pada Tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian analisis pelanggaran periode Januari s.d Desember 2024

INDIKASI PELANGGARAN SPKP								Total
Bulan	**DPI**	**DPI (laut lepas)**	**Jalur Penangkapan**	**Pelabuhan Pangkal/Muat**	**Perairan LN**	**Poaching**	**Transhipment**	
Jan	48	1	276	27	1	1	0	354
Feb	34	0	157	1	0	0	0	192
Mar	29	0	244	4	0	0	0	277
Apr	17	1	254	19	0	4	0	295
Mei	45	7	407	37	0	0	10	506
Jun	32	0	176	13	0	0	5	226
Jul	25	0	414	10	0	3	7	459
Ags	22	3	275	9	0	1	8	318
Sep	29	3	331	13	0	0	13	389
Okt	18	3	368	20	0	3	2	414
Nov	38	1	278	38	0	2	15	372
Des	138	1	306	35	0	1	5	486

2. Analisis Kapal di Kawasan Konservasi

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU 31/2004, menjelaskan bahwa konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin

keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Dalam konteks konservasi sumber daya ikan, konservasi ekosistem merupakan upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

Sesuai dengan peraturan tersebut dilakukan pemantauan terhadap Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia dan terdapat 736 kapal berizin pusat yang terpantau melakukan indikasi kegiatan penangkapan dan/atau labuh di dalam kawasan konservasi. Rincian jumlah kapal yang beroperasi di Kawasan Konservasi dapat dilihat dalam Tabel 6:

Tabel 4. Pemantauan Kapal di Kawasan Konservasi Januari-Desember 2024

No.	NAMA KAWASAN	JUMLAH
1	CAGAR ALAM KEPULAUAN KARIMATA	59
2	KAWASAN KONSERVASI AOI SUMBA SELATAN	1
3	KAWASAN KONSERVASI BANGKA SELATAN	1
4	KAWASAN KONSERVASI BASILIKA	1
5	KAWASAN KONSERVASI BATAM	2
6	KAWASAN KONSERVASI BIAK NUMFOR	20
7	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH DAMER PROVINSI MALUKU	3
8	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH KEPULAUAN TANIMBAR PROVINSI MALUKU	3
9	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH LIUKANG TANGAYA PROVINSI SULAWESI SELATAN	4
10	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT	4
11	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH TIMUR PULAU BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	26
12	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT DI PROVINSI PAPUA BARAT	5
13	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN WIDI DI PROVINSI MALUKU UTARA	5
14	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN PULAU AY DAN PULAU RHUN DI PROVINSI MALUKU	1
15	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN SERAM UTARA DAN SERAM UTARA BARAT DI PROVINSI MALUKU	1
16	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN SIKKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1
17		1
18	KAWASAN KONSERVASI DSAOI FLORES TIMUR	1
19	KAWASAN KONSERVASI DSAOI MAUBESI EKTENSI 1	1
20	KAWASAN KONSERVASI GRESIK	13
21	KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN ANAMBAS DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	35
22	KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN NATUNA	36
23	KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN RAJA AMPAT DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI PAPUA BARAT	1
24	KAWASAN KONSERVASI KOLEPOM	65
25	KAWASAN KONSERVASI KUR TAYANDO TAM	3
26	KAWASAN KONSERVASI LINGGA	10
27	KAWASAN KONSERVASI MALANG	7
28	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN ANGSANA, SUNGAI LOBAN, PULAU LAUT-PULAU SEMBILAN, KEPULAUAN SAMBARGELAP, DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	71
29	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BELITUNG DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1
30	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BURUWAY, ARGUNI, KAIMANA, TELUK ETNA, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI PAPUA BARAT	5
31	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KEPULAUAN ARU BAGIAN TENGGARA DAN LAUT DI SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU	151
32	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL LAUT SAWU DAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	22
33	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU RAO-TANJUNG DEHEGILA DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU UTARA	5
34	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN SELAT BUNGA LAUT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DI PROVINSI SUMATERA BARAT	1
35	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL BANGGAI, BANGGAI LAUT, BANGGAI KEPULAUAN, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH	1
36	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1
37	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEPULAUAN SULA DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU UTARA	12
38	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEPULAUAN TATOARENG DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI SULAWESI UTARA	2
39	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KUBU RAYA DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT	9

No.	NAMA KAWASAN	JUMLAH
40	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL LAMPUNG SELATAN	1
41	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PALOH DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1
42	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PULAU KOON, PULAU GOROGOS, PULAU NUKUS, PULAU NEDEN, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU	1
43	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PULAU RANDAYAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1
44	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PULAU-PULAU BATU NIAS SELATAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI SUMATERA UTARA	2
45	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAPANULI TENGAH DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI SUMATERA UTARA	6
46	KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL UJUNGNEGORO-ROBAN KABUPATEN BATANG DI PROVINSI JAWA TENGAH	2
47	KAWASAN KONSERVASI POPAYA	1
48	KAWASAN KONSERVASI PULAU BATANG DAN PULAU SEGAMA	5
49	KAWASAN KONSERVASI PULAU BIAWAK	2
50	KAWASAN KONSERVASI PULAU ENGGANO	17
51	KAWASAN KONSERVASI PULAU WUNGA	5
52	KAWASAN KONSERVASI PULAU-PULAU BATU TIMUR	3
53	KAWASAN KONSERVASI RUPAT UTARA	2
54	KAWASAN KONSERVASI SIAU TAGULANDANG BIARO	2
55	KAWASAN KONSERVASI SUMENEP	17
56	KAWASAN KONSERVASI SUNGAI BAKAU, SERUYAN HILIR TIMUR (SERUYAN)	1
57	KAWASAN KONSERVASI TANJUNG PANJANG	2
58	KAWASAN KONSERVASI WAY KAMBAS	2
59	KKP3K-25 KARANG MUARAS BARAT P. SAMBIT, KEC. MARATUA	1
60	TAMAN NASIONAL BUNAKEN	3
61	TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA	37
62	TAMAN NASIONAL KEPULAUAN SERIBU	48
63	TAMAN NASIONAL KEPULAUAN TOGEAN	3
64	TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE	1
65	TAMAN NASIONAL WAKATOBI	1
66	TAMAN WISATA ALAM PULAU BANYAK	3
67	TAMAN WISATA ALAM PULAU MARSEGU	1
68	TAMAN WISATA ALAM TELUK MAUMERE	1
TOTAL		**763**

3. Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dinyatakan bahwa setiap kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing diizinkan masuk ke wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan peraturan tersebut Tim Kerja Pengendalian Sistem dan Informasi Intelijen Kelautan dan Perikanan telah melakukan pemantauan terhadap rata-rata sebanyak 35 kapal pengangkut ikan hidup yang terpantau aktif pada setiap bulannya.

Tabel 5. Daftar Keaktifan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Kapal
1	Januari	32 Kapal
2	Februari	32 Kapal
3	Maret	37 Kapal
4	April	35 Kapal
5	Mei	36 Kapal
6	Juni	36 Kapal
7	Juli	35 Kapal
8	Agustus	37 Kapal
9	September	37 Kapal
10	Oktober	36 Kapal
11	November	36 Kapal
12	Desember	32 Kapal

4. Data untuk Operasi Kapal Pengawas / Airborne Surveillance

   Dalam rangka mendukung operasi kapal pengawas dan pelaksanaan airborne surveillance, telah di berikan kapal perikanan berdasarkan sistem pemantauan kapal perikanan (SPKP) dan Automatic Identification System (AIS) dilaksanakan data sebaran. Adapun rincian data yang disampaikan dapat di lihat dalam Tabel… sebagai berikut:

Tabel 6. Data Sebaran Kapal Perikanan sebagai Bahan Operasi Tahun 2024

No	Bulan	Ops Kapal Pengawas dan AS	Tanggal	Operasi	Jumlah Dokumen	Akumulasi
1	Januari	*Airborne Surveillance* dan Operasi KP	8 Januari 2024	11 WPP NRI	1	1
			13 Januari 2024	WPP NRI 716 dan 717		
			14 Januari 2024	WPP NRI 572, 711, 712, 713 dan 714		
			26 Januari 2024	WPP NRI 714, 715 dan 718		
2	Februari	*Airborne Surveillance* dan Operasi KP	05 Februari 2024	11 WPP NRI	1	2
			07 Februari 2024	WPP NRI 572, 711,712,713,714 dan 718		
			19 Februari 2024	WPP NRI 712,713 dan 714		
			20 Februari 2024	WPP NRI 711 dan 716		
			22 Februari 2024	WPP NRI 712 dan 713		
			23 Februari 2024	WPP NRI 711,712 dan 716		
			26 Februari 2024	WPP NRI 716 dan 717		
			27 Februari 2024	WPP NRI 711,712,716 dan 717		
3	Maret	*Airborne Surveillance* dan Operasi KP	04 Maret 2024	WPP NRI 711 dan 712	1	3
			12 Maret 2024	11 WPP NRI		
			13 Maret 2024	WPP NRI 712, 713 dan 714		
			19 Maret 2024	WPP NRI 711, 712 dan 713		
			20 Maret 2024	WPP NRI 711 dan 712		
			23 Maret 2024	WPP NRI 711 dan 714		
			25 Maret 2024	WPP NRI 713		
			28 Maret 2024	WPP NRI 713		
4	April	*Airborne*	01 April 2024	WPP NRI 711	1	4

No	Bulan	Ops Kapal Pengawas dan AS	Tanggal	Operasi	Jumlah Dokumen	Akumulasi
		Surveillance dan Operasi KP	12 April 2024	WPP NRI 714 dan 718		
			15 April 2024	WPP NRI 718		
			16 April 2024	WPP NRI 713, 714 dan 718		
			19 April 2024	WPP NRI 712, 713 dan 718		
			24 April 2024	WPP NRI 711, 712, 713, 714 dan 716		
			25 April 2024	WPP NRI 714 dan 718		
			26 April 2024	WPP NRI 713, 714 dan 573		
			27 April 2024	WPP NRI 711		
			30 April 2024	WPP NRI 712, 713, 714, 718 dan 573		
5	Mei	*Airborne Surveillance* dan Operasi KP	07 Mei 2024	WPP NRI 711, 714 dan 718	4	8
			08 Mei 2024	WPP NRI 573		
			09 Mei 2024	WPP NRI 573		
			14 Mei 2024	WPP NRI 713, 714 dan 718		
			19 Mei 2024	WPP NRI 715 dan 718		
			24 Mei 2024	WPP NRI 712		
			30 Mei 2024	WPP NRI 711, 713, 715, 716 dan 717		
6	Juni	*Airborne Surveillance* dan Operasi KP	09 Juni 2024	WPP NRI 713, 714 dan 718	3	11
			10 Juni 2024	WPP NRI 711, 716 dan 717		
			19 Juni 2024	WPP NRI 711		
			23 Juni 2024	WPP NRI 716 dan 717		
			25 Juni 2024	WPP NRI 711, 712, 713 dan 716		
7	Juli	*Airborne Surveillance* dan Operasi KP	01 Juli 2024	WPP NRI 712 dan 713	1	12
			16 Juli 2024	WPP NRI 711		
			31 Juli 2024	WPP NRI 571, 573, 711, 712, 713, 714 dan 718		
8	Agustus	*Airborne Surveillance* dan Operasi KP	05 Agustus 2024	WPP NRI 712, 713, 716 dan 717	1	15
			07 Agustus 2024	WPP NRI 716 dan 717		
			12 Agustus 2024	WPP NRI 716 dan 717	1	
			13 Agustus 2024	WPP NRI 573		
			14 Agustus 2024	WPP NRI 712		
			25 Agustus 2024	WPP NRI 712 dan 571	1	
			26 Agustus 2024	WPP NRI 571		
9	September	*Airborne Surveillance* dan Operasi KP	02 September 2024	11 WPP NRI	1	17
			06 September 2024	WPP NRI 713, 714 dan 715		
			11 September 2024	WPP NRI 711, 712, 713, 714 dan 716		
			18 September 2024	WPP NRI 712 dan 713	1	
			30 September 2024	WPP NRI 573, 711, 712, 713, 714, 715, 717 dan 718		
10	Oktober	*Airborne Surveillance* dan Operasi KP	30 Oktober 2024	WPP NRI 711, 712, 714, 716, 717 dan 718	1	18
11	November	*Airborne Surveillance* dan Operasi KP	30 November 2024	WPP NRI 711, 712, 714, 715, 716 dan 718	1	19
12	Desember	*Airborne Surveillance* dan Operasi KP	05 Desember 2024	WPP NRI 712, 713 dan 716	1	20
			17 Desember 2024	WPP NRI 714, 715, 716 dan 718	1	21

Keberhasilan dalam mencapai target IKU ini dipengaruhi oleh terpenuhinya seluruh komponen dan upaya maksimal Direktorat POA khususnya Tim Kerja Pengendalian Sistem dan Informasi Intelijen Kapal Pengawas serta keterlibatan pimpinan dalam

melakukan monitoring secara rutin.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 2 ini sebesar Rp6.162.350.000,- dan sampai dengan TW IV tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp5.914.567.112,- atau 95,98% dari alokasi anggaran dengan pagu blokir sebesar Rp247.782.888,-.

3 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengisian kuesioner Sistem Kepuasan Masyarakat Layanan SPKP menggunakan digital form pada Tools Survei Kepuasan (Aplikasi SI SUSAN) KKP, dimana hasil penilaian pengguna SPKP langsung diolah secara otomatis pada Aplikasi SI SUSAN. Aplikasi SI SUSAN merupakan aplikasi yang dibangun oleh Pusdatin KKP dalam rangka untuk membantu pengambilan responden dan menghitung nilai SKM yang sesuai dengan Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SKM Secara Realtime. Indeks Kepuasan Masyarakat terdiri dari indikator kuantitatif, yakni:

1. Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmiter (SKAT)

Layanan penerbitan dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmiter SPKP pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan.

2. Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan

Dengan adanya inovasi pengajuan secara mandiri, secara otomatis Pengguna akan mendapatkan akses untuk mengajukan layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan sekaligus untuk memantau kapal perikanan.

3. Analisis Pergerakan Kapal Perikanan

Bagi perusahaan perikanan yang memiliki keperluan khusus dalam melakukan tracking kapal perikanannya dapat mengetahui posisi pergerakan kapal perikanan yang dimiliki dengan cara mengajukan permohonan pelayanan analisis kapal perikanan kepada Direktur Jenderal PSDKP.

Gambar 7. Target dan Realisasi IKU 3 Periode TW IV Tahun 2024

Berdasarkan gambar di atas, realisasi capaian pada Tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 95.70 dari target sebesar 81 sehingga persentase capaian sebesar 118.15%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar 1.01% dimana capaian tahun 2023 adalah sebesar 94.21. Adapun target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 yaitu sebesar 80. Jika melihat capaian pada tahun 2020-2024, target pada Renstra berpotensi tercapai.

Capaian indikator ini diperoleh dari pelaksanaan survey kepuasan masyarakat secara offline bertempat di Pekalongan, Bali, Probolinggo dan Gorontalo. Selain itu, survey kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara online oleh pengguna layanan (Pemilik Kapal) dengan mengisi link google form yang telah disiapkan oleh Pusdatin KKP.

Potret hasil survey kepuasan masyarakat periode TW IV Tahun 2024 berdasarkan Aplikasi Si Susan sebagai berikut :

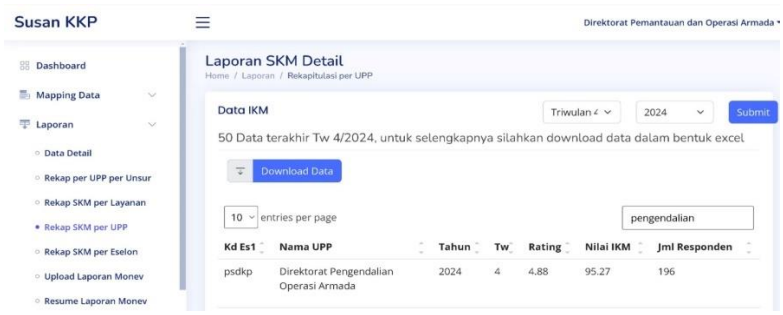

Gambar 8. Tangkapan Layar Aplikasi Si Susan KKP

Keberhasilan capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP serta peningkatan kinerja pada tahun 2024 beberapa faktor sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana aksi pelaksanaan survey kepuasan masyarakat tahun 2024;
2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna SPKP;
3. Adanya monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat.

Alokasi anggaran tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 3 ini sebesar Rp362.587.000,00 dan sampai dengan TW IV tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp157,280,870,00 atau 43,38% dari alokasi anggaran.

4 Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek lingkup Direktorat POA

Indikator Kinerja “Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorar POA” bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman Peserta BIMTEK yang dilaksanakan oleh Direktorat POA. Capaian Tingkat Pemahaman dari Peserta BIMTEK

diperoleh dari Ujian/Test yang dilakukan sesudah materi BIMTEK diberikan (Post Test) yang peserta Bimtek berasal dari stakeholder atau para pemilik kapal perikanan.

Gambar 9. Target dan Realisasi IKU 4 Periode TW IV Tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas, capaian IKU “Tingkat Pemahaman Peserta BIMTEK Lingkup Direktorat POA” capaian tahun 2024 lebih tinggi 0,61% dari tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 dengan target 80 dapat dipastikan dapat dicapai diatas target.

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung dengan pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dilaksanakan di 2 (dua) lokasi, yaitu:

1. Pelabuhan Perikanan Samudera Tanjung Balai Karimun, Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan teknis aplikasi SPKP dilaksanakan bertempat di Aston Karimun City Hotel, Tanjung Balai Karimun Kep. Riau pada tanggal 03 Oktober 2024. Kegiatan tersebut dihadiri Sebagian stakeholders/pengguna layanan SPKP yang kapalnya berpangkalan di PPS Tanjung Balai Karimun – Kepulauan Riau.
2. Pelabuhan Perikanan Samudera Gorontalo
   Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan teknis aplikasi SPKP dilaksanakan bertempat di Ballroom Bappeda Provinsi Gorontalo, pada tanggal 29 November 2024. Kegiatan tersebut dihadiri sebagian stakeholders/pengguna layanan SPKP yang kapalnya berpangkalan di PPS Gorontalo.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 4 ini sebesar Rp306.441,- realisasi Rp304.415.950,- atau 99.33 %.

SASARAN KEGIATAN 3

TERSELENGGARANYA OPERASI ARMADA PENGAWASAN SDKP YANG EFEKTIF

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif” diukur dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

5 Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli

Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Pesawat Patroli agar terwujudnya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif. Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Persentase Jumlah Kapal yang di Validasi;
6. Persentase Operasi di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717);
7. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir,Pulau-pulau kecil, dan Kawasan Konservasi;
8. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Terkoordinasi Regional, Nasional dan Internasional;
9. Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan).

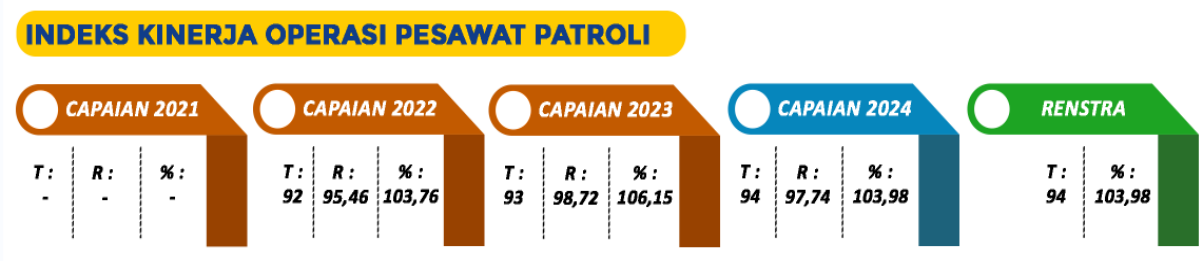

Gambar 10. Target dan Realisasi IKU 5 Periode TW IV Tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas, realisasi capaian pada TW IV tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 97.74 dengan persentase capaian sebesar 103,98%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada tahun 2023,

mengalami penurunan sebesar 0.98.

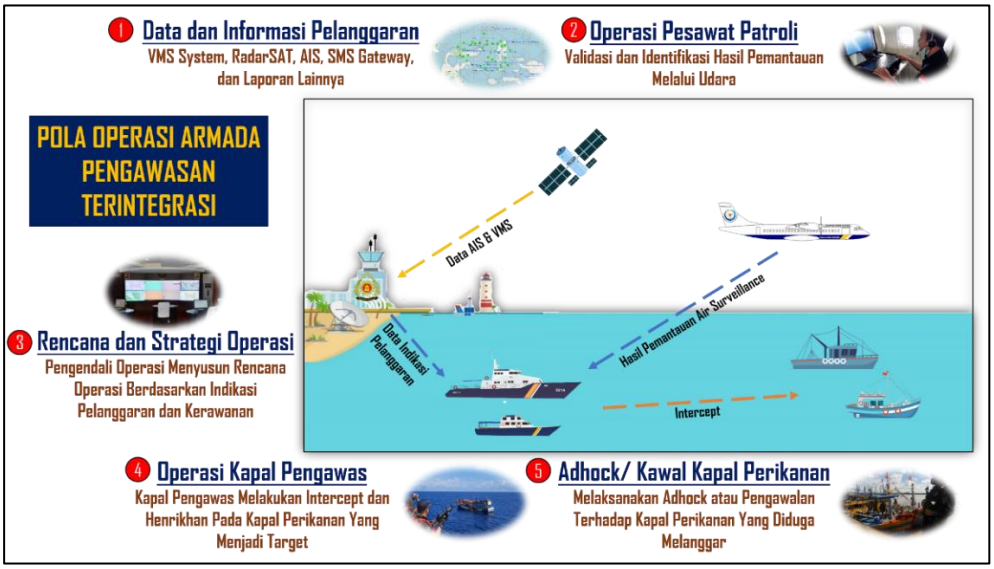

Gambar 11. Pola Operasi Armada Pengawasan Terintegrasi

Hasil capaian yang melebihi target ini dikarenakan kegiatan operasi pesawat patroli telah mencapai target operasi sebagaimana telah ditetapkan. Target tersebut mencakup jumlah kapal perikanan yang dipantau, coverage area pengawasan, capaian hari operasi, tindak lanjut atas target operasi yang diberikan, jumlah kapal yang divalidasi, dukungan pemantauan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengawasan konservasi, dan dukungan terhadap patroli terkoordinasi baik nasional maupun regional. Capaian ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan telah tercapai dengan maksimal. Hal ini tidak terlepas dari upaya pembinaan yang dilakukan selama periode bulanan secara langsung oleh Direktur Pengendalian Operasi Armada. IKU ini terdapat target Renstra tahun 2020-2024 sebesar 94, sehingga IKU ini dapat tercapai melebihi target.

Selama periode operasi sampai dengan TW IV Tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 26 (dua enam) periode operasi. Dari pelaksanaan operasi tersebut diperoleh sebanyak 191 hari operasi. Pesawat yang digunakan antara lain: Pesawat *Maritime Patrol Aircraft* MPA ATR 42-300 PK-YRE dan Pesawat Milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Kementerian Perhubungan. Adapun periode operasi dilaksanakan secara terintegrasi dengan armada kapal pengawas di laut sebagai berikut:

Tabel 7. Pelaksanaan Operasi Pesawat Patroli Tahun 2024

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM^2)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
I	3 - 6 Januari 2024	4	712	11305.6	Operasi Mandiri	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
I-A	12 - 19 Januari 2024	12	716, 717, 572, 571, 715, 714	106296	KP. HIU 12, KP. HIU 01	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30GT terhadap SPKP. 2. Penerusan informasi keberadaan aktivitas Kapal Ikan Asing di Laut Sulawesi 3. Penerusan informasi aktivitas kapal trawl di perairan Sibolga 4. Pemantauan objek kelautan meliputi 2 KPPN, 4 Pulau-Pulau Kecil Terluar, 7 Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan 1 Objek Lainnya berupa Oil n Gas Field. 5. Update database hasil pemantauan sebagai bahan operasi berikutnya.
II	20 & 29 Februari	2	712	-	Operasi	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM²)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
	2024				Mandiri	dan Perikanan berjalan dengan lancar
II-A	21 Februari – 4 Maret 2024	11	712, 713, 716, 717, 715, 711	153366.4	KP. ORCA 04	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30GT terhadap SPKP dengan status transmitter aktif. 2. Penerusan informasi keberadaan aktivitas Kapal Ikan Asing di Laut Sulawesi kepada Direktorat POA sebagai bahan operasi kapal pengawas. 3. Pemantauan objek kelautan meliputi P. Karimun Jawa, WP3K Pulau Sepanjang, WP3K Pulau BirahBirahan, PPKT P. Mantehage, P. Miangas, P. Marore, TWP Padaido, WP3K P. Ingar, WP3K Banda Neira, WP3K P. Alangtiga, P. Berhala 4. Update database hasil pemantauan sebagai bahan operasi berikutnya.
III	4 Maret 2024	1	712	-	Operasi Mandiri	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
III-A	5 - 23 Maret 2024	13	573, 712, 714, 718, 711	41600	KP. ORCA 05	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30GT terhadap SPKP yakni 15 Kapal Purse Seine di Sektor Operasi 2. Tidak terdapat Kapal Ikan Asing di Laut Natuna Utara (WPPNRI 711). 3. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi. 4. Telah dilaksanakan dukungan kerja MKP dengan lancar. 5. Update database hasil pemantauan sebagai bahan operasi berikutnya.
IV	29 Maret - 17 April 2024	14	712, 571, 714, 718	108.269	KP. ORCA 06, KP. PAUS 01, KP. ORCA 04	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30GT terhadap SPKP yakni 1 Kapal Gillnet dan 1 Kapal Purse Seine 2. Telah dilaksanakan pengawasan dan pencarian terhadap kapal IUU Fishing KM. Runzheng 03 dan Runzheng 05 kapal berbendera Rusia. 3. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi. 4. Telah dilaksanakan dukungan kerja MKP dengan lancar. 5. Update database hasil pemantauan sebagai bahan operasi berikutnya.
IV-A	18 - 20 April 2024	3	713	-	Operasi Mandiri	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
IV-B	19 - 20 April 2024 25 April - 3 Mei 2024	7	718, 572	10763.2	KP. ORCA 06, KP. PAUS 01, KP. ORCA 04	1. Telah dilaksanakan pengawasan dan pencarian terhadap kapal IUU Fishing KM. Runzheng 03 dan Runzheng 05 kapal berbendera Rusia. 2. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi. 3. Telah dilaksanakan dukungan kerja MKP dengan lancar. 4. Update database hasil pemantauan sebagai bahan operasi berikutnya.
V	3 Mei 2024	1	712	-	Operasi Mandiri	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
V-A	6 - 26 Mei 2024	14	573, 718, 712	39763.2	PAUS 01, ORCA 05	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30GT terhadap SPKP yakni 5 Kapal Purse Seine. 2. Telah dilaksanakan dukungan pengawasan operasi bersama Gannet - 8 Ausindo di Perairan laut Indonesia - Australia. 3. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi. 4. Telah dilaksanakan dukungan kerja MKP dengan lancar. 5. Telah dilakukan pencarian terhadap KM. Run Zheng 03, dan KP. Paus 01 telah melakukan Ad-hock terhadap KIA berbenbera Rusia tersebut.
VB	19 - 22 Mei 2024	3	712	-	Operasi Mandiri	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
VI	29 Mei - 5 Juni 2024	8	718, 716	-	Operasi Mandiri	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
VI-A	27 Mei - 7 Juni 2024	16	717, 718, 714, 712, 716	81832	KP. ORCA 04 KP. ORCA 06	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30 GT terhadap SPKP, 1 Kapal Purse Seine (KM. Senang

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM²)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
						Hati – 10) dan 1 Kapal Squid Jigging (KM. Perintis Jaya) dengan status aktif. 2. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi. 3. Telah dilaksanakan dukungan kerja MKP dengan lancar. 4. Telah dilaksanakan dukungan kegiatan misi SAR dalam pencarian kapal nelayan yang hilang di perairan utara Surabaya 5. Telah dilaksanakan dukungan operasi misi intercept kapal KIA Filipina oleh KP Orca 04 dan KP Orca 06
VI-B	26 Juni – 9 Juli 2024	8	713, 573	18432	Operasi Mandiri	1. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi. 2. Telah dilaksanakan dukungan kerja MKP dengan lancar
VII-A	22 Juli - 2 Agustus 2024		711, 712, 713, 716	109.609,6	Operasi Mandiri	1. Penerusan informasi keberadaan aktivitas Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Laut Sulawesi kepada Direktorat POA sebagai bahan operasi kapal pengawas. 2. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi. 3. Telah dilaksanakan dukungan kerja MKP dengan lancar. 4. Laporan Indikasi Pelanggaran di WPPNRI 716, 711 dan 713 telah disampaikan kepada unit terkait untuk dilakukan tindak lanjut
VIII-A	15 - 19 Agustus 2024	4	573	-	Operasi Mandiri	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
IX	1 – 2 September 2024	2	712	-	Operasi Mandiri	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
IX-A	27 Agustus – 19 September 2024	8	572, 714, 713	23.921,6	Operasi Mandiri	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30 GT terhadap SPKP. 2. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi. 3. Telah dilaksanakan dukungan kerja MKP dengan lancar. 4. Update database hasil pemantauan sebagai bahan operasi berikutnya.
IX-B	12 – 13 September 2024	2	713	-	Operasi Mandiri	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
X	21 September - 19 Oktober 2024	14	712	11537,6	Operasi Mandiri	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30 GT terhadap SPKP. 2. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi. 3. Telah dilaksanakan dukungan kerja MKP dengan lancar. 4. Update database hasil pemantauan sebagai bahan operasi berikutnya.
XI	26 Oktober - 5 November & 11 Desember 2024	7	714, 713, 718	MPA ATR 42-300 PK-YRE	Operasi Mandiri	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30 GT terhadap SPKP. 2. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi. 3. Telah dilaksanakan dukungan kerja MKP dengan lancar. 4. Update database hasil pemantauan sebagai bahan operasi berikutnya.
XI-A	14 - 23 November 2024	7	712, 711	MPA ATR 42-300 PK-YRE	Operasi Mandiri	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30 GT terhadap SPKP. 2. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi. 3. Telah dilaksanakan dukungan kerja MKP dengan lancar. 4. Update database hasil pemantauan sebagai bahan operasi berikutnya.
XII	10 - 11Desember 2024	1	712	Beechcraft King 350i PK - CAQ	Operasi Mandiri	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
Total Hari Operasi		**191**	**Total Coverage Area (NM2)**	**928.127**		

Adapun hasil operasi pesawat patroli udara yang terintegrasi selama tahun 2024 sebagaimana terlihat pada gambar berikut;

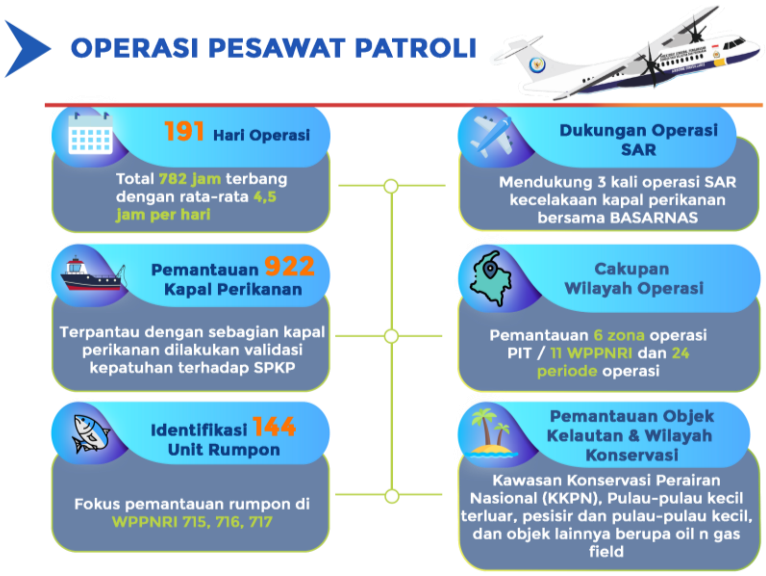

Gambar 12. Hasil Operasi Pesawat Patroli

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Responsif terhadap realisasi penggunaan pesawat udara harian sehingga dapat menyesuaikan volume harian penggunaan jam operasi.
2. Pergerakan pesawat udara dilaksanakan pada wilayah-wilayah prioritas dengan indikasi kerawanan sedang dan tinggi serta menambah target operasi pengawasan kelautan yang berada pada wilayah-wilayah yang beririsan dengan pengawasan perikanan sehingga meningkatkan capaian operasi;
3. Tersedia data dan informasi dari Pusat Pengendalian Ditjen PSDKP (Command Center) yang mendukung operasi pengawasan SDKP melalui udara.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 5 ini sebesar Rp63.952.000.000,00 dan sampai dengan TW IV tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp 63.460.116.403,- atau 99.23% dari alokasi anggaran dengan pagu blokir Rp487.600.000,-

6 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasi Kapal Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan sebanyak 9 variabel, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing;

6. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
7. Jumlah Pemutusan Rumpon Ilegal;
8. Dukungan Kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, dan Internasional;
9. Dukungan Kegiatan Sosial dan Penyelamatan.

Gambar 13. Rincian capaian IKU 6 Direktorat POA TW IV Tahun 2024

Berdasarkan gambar di atas, realisasi capaian pada Tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 97.26 dengan persentase capaian sebesar 106.88%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2023, terdapat peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah target meningkat yang sebelumnya 87.70 menjadi 91 indeks, namun untuk capaian meningkat 1.86. Peningkatan hasil target pemeriksaan kapal perikanan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan tingkat kepatuhan kapal perikanan dan juga mendukung kebijakan program Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Adapun target pada Renstra 2020-2024 adalah indeks 87.7 dan dapat dicapai diatas target.

Gambar 14. Kegiatan Menghentikan, Memeriksa dan Menahan (henrikhan) oleh Kapal Pengawas

Selama periode TW IV Tahun 2024 Kapal Pengawas telah melaksanakan Operasi Mandiri Kapal Pengawas dengan jumlah hari sebanyak 2357 hari) dari 12 Kapal Pengawas dengan rata-rata hari operasi setiap kapal pengawas sebanya 69,3 hari operasi. Adapun hasil operasi kapal pengawas periode TW IV telah berhasil memeriksa sebanyak 7235 Kapal (KII 7200, KIA 34). Jumlah kapal yang ditangkap sebanyak 216 Kapal (KII 190, KIA 26),

dengan 3 Objek kelautan yang terawasi dan 28 rumpon.

Tabel 8. Hasil Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Ditjen PSDKP Tahun 2024

NO	NAMA KAPAL PENGAWAS	RIKSA KAPAL PERIKANAN			TANGKAPAN KAPAL PERIKANAN		
		KII	KIA	JML	KII	KIA	JML
1	KP. ORCA 01	310	0	310	27	0	27
2	KP. ORCA 02	246	5	251	0	2	2
3	KP. ORCA 03	331	2	333	15	1	16
4	KP. ORCA 04	89	1	90	2	1	3
5	KP. ORCA 05	672	0	672	8	0	8
6	KP. ORCA 06	396	6	402	0	6	6
7	KP. BARAKUDA 01	301	0	301	2	0	2
8	KP. BARAKUDA 02	233	0	233	3	0	3
9	KP. HIU MACAN TUTUL 01	59	0	59	0	0	0
10	KP. HIU MACAN TUTUL 02	263	0	263	3	0	3
11	KP. PAUS 01	467	1	468	1	1	2
12	KP. AKAR BAHAR 01	0	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL		**7200**	**35**	**7235**	**190**	**26**	**216**

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Tersedianya logistik kapal pengawas sesuai rencana operasi yang ditetapkan;
2. Tersedianya Rencana Operasi (RO) berdasarkan sumber data yang tersedia dari Pusat Pengendalian Ditjen PSDKP (*Command Center*) dan sumber informasi lainnya;
3. Monitoring dan evaluasi terhadap capaian operasi kapal pengawas dilakukan secara berkala.

Alokasi anggaran tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 7 ini Rp319.244.023.000,- dan sampai dengan TW IV Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp276.016.818.327,- atau 86,45% dari total pagu dengan pagu blokir Rp5.986.974.000,- dan Pemanfataan PNPB SDA sebesar Rp42.548.823.591,-.

7 Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas

Indikator ini digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas dalam mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik dimaksud meliputi Logistik Kapal dan Logistik Personel. Logistik kapal terdiri dari Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas, sementara itu logistik personel terdiri dari : Bahan Makanan, Air Tawar, Alat-alat Pelayanan (ATK dan Bahan Komputer), dan senjata api. Capaian TW IV tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 serta target akhir Renstra 2024 ditabulasikan sebagai berikut :

Gambar 15. Target dan Realisasi IKU 7 Periode TW IV Tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas, realisasi pada tahun 2024 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Indikator ini capaiannya sama dengan periode yang sama di tahun 2023, namun tidak dapat dibandingkan dengan periode akhir renstra 2020-2024 dikarenakan indikator tersebut merupakan inisiatif baru pada TW IV tahun 2023. Adapun rincian capaian setiap komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Target dan Realisasi IKU 7 Periode TW IV Tahun 2024

No	Komponen	Target	Realisasi	%
1	Pemenuhan Kebutuhan BBM (30%)	30%	30%	100
2	Pemenuhan Kebutuhan Pelumas (20%)	20%	20%	100
3	Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP (25%)	25%	25%	100
4	Pemenuhan Kebutuhan Air Tawar (15%)	15%	15%	100
5	Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan (5%)	5%	5%	100
6	Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (5%)	5%	5%	100
	Total Nilai	100	100	100

Kegiatan pada tabel diatas adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengisian bahan bakar sesuai dengan jadwal pengajuan BBM kapal pengawas, melaksanakan pemenuhan bahan makanan/natura, air bersih, minyak pelumas, alat - alat pelayanan dan pelaporan senjata api tepat waktu sesuai dengan periode triwulanan yang telah di tetapkan;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke kapal pengawas terkait pelaksana pekerjaan secara berkala terkait pengisian bbm melalui aplikasi SIGOTIK maupun secara manual, bahan makan/natura, air bersih, minyak pelumas, alat-alat pelayanan dan pemenuhan senjata api;
3. Melaksanakan pendampingan dan koordinasi dengan pihak pertamina baik pusat maupun UPT PSDKP;
4. Menyusun dokumen manajemen risiko dan melakukan pemantauan risiko terhadap kegiatan Logistik.

Gambar 16. Pengisian Bahan Bakar Minyak KP Orca 01 dan Pemenuhan Minyak Pelumas KP. Paus 01

Keberhasilan mencapai target IKU pada tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Direktur POA berkomitmen penuh dalam mendukung kegiatan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, baik melalui penangkapan ikan terukur berbasis kuota maupun pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Upaya ini bertujuan menegakkan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan prinsip "ekologi sebagai panglima," demi keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan. Untuk mendukung kegiatan ini, Direktorat POA memastikan ketersediaan logistik Kapal Pengawas secara optimal;
2. Pelaksanaan pemantauan risiko dilakukan secara berkesinambungan dengan mengawasi, mengevaluasi, dan meninjau efektivitas strategi pengelolaan risiko secara berkala. Langkah ini memastikan risiko dapat diminimalkan dan dikelola dengan baik.
3. Penggunaan SIGOTIK dioptimalkan sebagai alat utama dalam pengelolaan logistik, sehingga mendukung kelancaran operasional pengawasan secara efisien dan tepat sasaran.

Alokasi anggaran tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 7 ini Rp319.244.023.000,- dan sampai dengan TW IV Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp276.016.818.327,- atau 86,45% dari total pagu dengan pagu blokir Rp5.986.974.000,- dan Pemanfataan PNPB SDA sebesar Rp42.548.823.591,-

8 Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas

Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (AKP) merupakan ukuran kesiapan ASN AKP (Kelas I – IV) berdasarkan kualifikasi pendidikan, sertifikat keahlian pelaut, sertifikat keterampilan pelaut, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (MCU), dan psikotest pemegang senjata api, dalam melaksanakan tugas sesuai jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara. Rincian capaian IKU 8 Direktorat POA periode TW IV Tahun 2024 ditabulasikan pada tabel berikut:

Gambar 17. Target dan Realisasi IKU 8 Periode TW IV Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian kinerja pada TW IV tahun 2024 tercapai 94.68 Indeks. Capai IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan periode akhir renstra 2020-2024 dikarenakan indikator tersebut merupakan inisiatif baru pada tahun 2023.

Keberhasilan mencapai target IKU pada tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Medical Check Up (MCU) bagi Awak Kapal Pengawas.
2. Telah mengajukan daftar nama awak kapal yang akan melaksanakan peningkatan pendidikan (Izin Belajar) dan peningkatan sertifikasi keahlian Pelaut bagi AKP.

Gambar 18. Kegiatan Sertifikat Keahlian Awak Kapal Pengawas dan kegiatan Medical CekUp bagi Awak Kapal Pengawas

Alokasi anggaran tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 8 ini Rp1.768.289.000,- dan sampai dengan TW IV Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp1.744.981.661,- atau 98.68%.

9 Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Operasi Armada Pengawasan SDKP

Persentase Penyelesaian rancangan kebijakan pemerintah di bidang Pengawakan dan Logistik pada Tahun yaitu pada tahun 2024 ini Tim Kerja Pengawakan dan Logistik menyusun Rancangan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP tentang Pedoman Penggunaan Perawatan Pemeliharaan dan Pemusnahan Senjata Api lingkup Direktorat POA dimana sampai dengan TW IV tahun 2024 telah telah diselesaikan mulai tahap persiapan dengan menyusunan Identifikasi Substansi, Outline, Zero Draft. Tahap pelaksanaan yaitu pembahasan draft, uji publik draft dan draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses legal drafting dan pengesahan selanjutnya tahap pelaporan dengan manyampikan laporan dan draft final kepada Sesditjen PSDKP. Keputusan Direktur Jenderal ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA dalam pengelolaan dan penggunaan Senjata Mesin Kaliber 12.7 mm bagi setiap Awak Kapal Pengawas dalam meningkatnya kinerja Awak Kapal Pengawas. Adapun rincian capaian IKU 9 Direktorat POA periode Tahun 2024 ditabulasikan pada tabel berikut:

Gambar 19. Target dan Realisasi IKU 9 Periode TW IV Tahun 2024

Pada tahun 2024, capaian IKU “Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Operasi Armada Pengawasan SDKP” ditargetkan sebesar 100%. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode TW IV Tahun 2024 telah tercapai pada TW IV. Sementara itu, tidak terdapat target pada Renstra 2024.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 9 ini sebesar Rp500.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp412.684.206,- atau sebesar 82.53% dengan pagu blokir Rp80.000.000,-

SASARAN KEGIATAN 4

TERSELENGGARANYA PEMBANGUNAN SERTA PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP YANG SESUAI KETENTUAN

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

10 Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan

Indikator Kinerja "Persentase Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan" IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase penyelesaian jumlah armada dan fasilitas pendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang akan dibangun di tahun berjalan.

Pada tahun 2024 direncanakan diadakan penambahan jumlah sarana pengawasan berupa kapal pengawas sebanyak 10 unit dengan menggunakan skema PHLN dari Pemerintahan Spanyol. Sebanyak 6 kapal akan dibangun di Indonesia dan 4 Unit akan diselesaikan di Spanyol. Akan tetapi kegiatan dapat dimulai menunggu terbitnya atau ditandatangani nya *Loan Agreement* antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Spanyol. Rincian capaian IKU 10 Direktorat POA periode TW IV Tahun 2024 ditabulasikan pada tabel berikut:

Gambar 20. Target dan Realisasi IKU 10 Periode TW IV Tahun 2024

Perbandingan capaian tahun 2023 pembangunan kapal kelas II multiyers kontrak selama 2 tahun anggaran sama dengan capaian tahun 2024,yaitu tercapai sebesar 100%, dengan pemenuhan target sebesar 5% dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dapat dicapai apabila *loan agreement* sudah terbit/disahkan oleh Kementerian Keuangan.
2. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan mengalami blokir anggaran/*Automatic Adjustment* (AA) dan *Loan Agreement* PHLN yang belum juga ditandatangani dalam jangka waktu tertentu atau belum adanya kejelasan, maka tidak dilakukan

penilaian atau target telah terpenuhi.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk merealisasikan target tersebut, antara lain:

1. Menunggu kebijakan terkait dengan peningkatan sarana pengawas pada tahun anggaran 2024.
2. Menyiapkan dokumen administrasi seperti dokumen penyusunan jadual palang, rencana proses pendampingan atau supervisi, menyusun progres pembangunan yang dapat menunjang kegiatan peningkatan sarana, jika ada arah kebijakan pembukaan blokir anggaran.

Alokasi anggaran tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 10 ini sebesar Rp30.000.000.000,00 dan sampai dengan TW IV tahun 2024 belum ada realisasi karena anggaran masih diblokir administratif.

11 Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP

Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran (indeks) yang digunakan untuk menilai kualitas kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan yang telah dilakukan sehingga kapal pengawas dapat dinyatakan ‘’Laik Operasi’’. Indeks kualitas dimaksud di atas didapatkan berdasarkan laporan hasil survey yang dilakukan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang menyatakan sebuah kapal pengawas yang telah disurvey masuk dalam kategori ‘’Laik Operasi’’ atau ‘’Tidak Laik Operasi’’. Penilaian ini tujuan untuk menilai kelaikan Kapal Pengawas melalui lima aspek, yaitu; aspek konstruksi, aspek navigasi dan komunikasi, aspek permesinan dan kelistrikan, aspek keselamatan dan pemadam, dan aspek tambat labuh

Adapun capaian IKU Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP sampai dengan TW IV tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Gambar 21. Target dan Realisasi IKU 11 Periode TW IV Tahun 2024

Berdasarkan gambar di atas, realisasi capaian IKU 11 pada TW IV tahun 2024 telah tercapai sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2023.

Survey kondisi dan penilaian teknis oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) terhadap kapal pengawas yang dikelola oleh Direktorat Pengendalian Operasi Armada dilakukan menggunakan metode Condition Assesment Programe (CAP), yaitu program penilaian kondisi kapal, baik lambung, permesinan, maupun sistem operasinya dimana hasil penilaian dari kondisi kapal tersebut akan disajikan dalam bentuk CAP Grading dengan skala 1 sampai dengan 4 dimana skor tertinggi yaitu pada skala 4 (empat) dengan predikat ‘’excellent’’. Hasil penilaian terhadap Kapal Pengawas di Direktorat Pengendalian Operasi

Armada pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Hasil Penilaian oleh BKI Pada Tahun 2024

No	Nama Kapal Pengawas	ASPEK PENILAIAN					Total
		1	2	3	4	5	
1	KP ORCA 01	1	1	1	1	1	5
2	KP ORCA 02	1	1	1	1	1	5
3	KP ORCA 03	1	1	1	1	1	5
4	KP ORCA 04	1	1	1	1	1	5
5	KP ORCA 05	1	1	1	1	1	5
6	KP ORCA 06	1	1	1	1	1	5
7	KP BARAKUDA 01	1	1	1	1	1	5
8	KP BARAKUDA 01	1	1	1	1	1	5
9	KP PAUS 01	1	1	1	1	1	5
10	KP HMT 01	1	1	1	1	1	5
11	KP HMT 02	1	1	1	1	1	5
12	KP AKAR BAHAR	1	1	1	1	1	5

Dalam rangka mencapai target tersebut, terdapat beberapa hal yang sedang dan akan dilakukan oleh Direktorat POA diantaranya sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas yang terdiri dari perawatan pencegahan, perawatan prediktif, dan perawatan darurat secara efisien dan berkesinambungan;
2. Melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas dengan pelaksana pekerjaan secara berkala;
3. Menyusun dokumen manajemen risiko, mengimplementasikan, dan melakukan pemantauan risiko terhadap kegiatan perawatan;
4. Menurunkan tim supervisi kegiatan perawatan secara berkala untuk melakukan pemantauan hasil perawatan dan memvalidasi detail pekerjaan di lapangan; dan
5. Senantiasa berkonsultasi dengan APIP terkait pelaksanaan dan monitoring perawatan kapal pengawas.

Alokasi anggaran tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 11 ini sebesar Rp.197.135.000,- dan sampai dengan akhir TW IV tahun 2024 realisasi sebesar 100%.

12 Nilai Supervisi Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP

Nilai Supervisi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran untuk mengukur kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang telah dilakukan oleh UPT, supervisi dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Operasi Armada dan hasilnya dituangkan dalam sebuah laporan supervisi. Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah kegiatan supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan SDKP. Supervisi dilaksanakan secara daring dan/atau kunjungan langsung ke lokasi dengan tujuan untuk memonitor dan mengevaluasi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP di Unit Pelaksana

Teknis (UPT) lingkup Ditjen PSDKP.

Pada tahun 2024 Sarana Pengawasan SDKP yang dinilai meliputi : Kapal Pengawas Kelas III sebanyak 12 unit, Kapal Pengawas Kelas IV sebanyak 10 unit dan Kapal Pengawas Kelas VI sebanyak 68 unit (Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat). Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP meliputi perawatan pencegahan, perawatan prediktif dan perawatan darurat. Capaian IKU Nilai Supervisi Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan sampai dengan TW IV tahun 2024 sebagai berikut:

Gambar 22. Target dan realisasi IKU-12 periode TW IV Tahun 2024

Nilai realisasi IKU 12 pada TW IV tahun 2024 ada karena penilaian capaian IKU dilaksanakan pada TW IV atau semester II. Nilai indikator kinerja ini didapatkan dari jumlah dokumen laporan supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dilakukan di UPT lingkup Ditjen PSDKP.
Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai target adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan jadwal supervisi yang tepat dan akurat sesuai kebutuhan;
2. Koordinasi yang baik dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kapal Pengawas.
3. Metode pelaksanaan yang efektif dan efisien.
4. Monitoring dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP secara berkala dan rutin.

Alokasi anggaran tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 12 ini sebesar Rp24.905.504.000,- dan sampai dengan akhir TW IV tahun 2024 telah ada realisasi sebesar Rp.24.905.504,- atau 99.93%.

13 Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP

Nilai supervisi adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kegiatan supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP di lingkungan Ditjen PSDKP. Supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP adalah penilaian kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi. Prasarana pengawasan SDKP sesuai dengan Perdirjen PSDKP nomor 10/DJPSDKP/2020 tentang Penyiapan Prasarana Pengawasan SDKP terbagi menjadi

dua jenis yaitu prasarana pengawasan SDKP utama dan pendukung.

Pembangunan prasarana pengawasan dilaksanakan oleh UPT lingkup Ditjen PSDKP dan pelaksanaannya disupervisi oleh Direktorat Pengendalian Operasi Armada selaku pembina teknis kegiatan. Supervisi dilakukan pada setiap tahap pembangunan, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan proses pembangunan prasarana. Penilaian IKU dimulai pada saat kegiatan Perencanaan Teknis, antara lain penilaian terhadap ketersediaan dokumen perencanaan yang disusun oleh Konsultan Perencana. Dokumen tersebut terdiri dari Gambar Teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKSS) dan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Penilaian kegiatan Pelaksanaan Konstruksi didasarkan pada penilaian terhadap dokumen yang disusun oleh Penyedia Jasa Konstruksi yang terdiri dari laporan kegiatan pembangunan, shop drawing, jadwal kerja/kurva S, as built drawing. Penilaian kegiatan Pengawasan Konstruksi didasarkan pada penilaian terhadap dokumen yang disusun oleh Konsultan Pengawas yang terdiri dari laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan. Pada Tahun 2024, dilaksanakan pembangunan prasarana pada UPT Ditjen PSDKP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11. Rincian Nilai Supervisi Pembangunan Prasarana di UPT

NO	PRASARANA PSDKP YANG DIBANGUN	DOKUMEN YANG DINILAI									BOBOT TIAP PEMBANGUNAN
		Perencanaan Teknis				Pembangunan Konstruksi/Fisik				Pengawasan Pembangunan		
		Gambar Teknis/DED	RAB	Hitungan TKDN	RKSS	Shop drawing	Kurva S	Laporan	Asbuilt Drawing	Laporan Mingguan	Laporan Bulanan	
1	Pematangan Lahan PSDKP Jakarta	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
2	Pembangunan Gudang PSDKP Pontianak	10	10	10	10	10	10		10	10	10	90
3	Pembangunan Pos Wilker PSDKP Berau/Derawan	10	10	10	10	10	10		10	10	10	90
4	Pembangunan Gudang PSDKP Lampulo	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
5	Pembangunan Pos Pengawas SDKP Bungus/Padang	10	10	10	10		10			10	10	70
6	Rehabilitasi Pos Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung	10	10	10	10	10	10		10	10	10	90
7	Pembangunan Pos Pengawasan Satwas PSDKP Morowali	10	10	10	10	10	10			10	10	80
8	Renovasi Pos Pengawasan Satwas SDKP Kendari (menjadi renovasi mess pangakalan PSDKP Bitung)	10	10	10			10			10	10	60
9	Renovasi Pos Pengawasan Satwas SDKP Palembang	10	10	10	10	10	10			10	10	80
10	Pembangunan Pos Pengawasan Satwas SDKP Probolinggo	10	10	10	10	10	10			10	10	80
11	Pembangunan Pos Pengawasan Satwas SDKP Sumbawa	10	10	10	10	10	10		10	10	10	90
12	Pembangunan Pos Pengawasan Satwas PSDKP Sorong	10	10	10	10	10	10			10	10	70
13	Renovasi Kontruksi Pos Pengawasan Stasiun PSDKP Belawan Tahap II	10	10	10	10	10	10			10	10	80
Nilai supervisi penyelesaian pembangunan prasarana PSDKP												**83,0**

Nilai 83.08 berasal dari dihitung akumulatif setiap triwulan yang terdiri dari penilaian terhadap dokumen Perencanaan Teknis berupa gambar teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKSS) dan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dokumen Pelaksanaan Konstruksi berupa laporan kegiatan pembangunan, shop drawing, jadwal kerja/kurva S, as built drawing dan dokumen Pengawasan Konstruksi berupa laporan mingguan dan laporan bulanan pembangunan prasarana utama. Nilai Supervisi penyelesaian dibandingkan dengan target terlihat pada tabel berikut:

Gambar 23. Target dan realisasi IKU-13 periode TW IV Tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas, realisasi capaian pada TW IV 2024 sebesar 83.08 lebih tinggi 102.56% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 81 poin. Capaian pada TW IV ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di Tahun 2023 yaitu sebesar 2.08. Untuk target Renstra 2020-2024 juga tidak dapat dibandingkan.

Keberhasilan dalam mencapai target IKU 13, didukung oleh beberapa strategi sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan UPT selaku pelaksana kegiatan, baik melalui surat, pertemuan, dan supervisi secara langsung di lapangan;
2. Ikut memberi masukan kepada konsultan perencana, kontraktor, dan konsultan pengawas apabila diperlukan; dan
3. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP selama pelaksanaan kegiatan.
4. Melakukan monitoring dan pengendalian Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP secara berkala.

Alokasi anggaran tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 13 ini sebesar Rp632.858.000,- dan sampai dengan TW IV tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp620.472.190,- atau 98.04% dari alokasi anggaran.

14 Persentase penyelesaian rancangan NSPK Bidang pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP

Persentase penyelesaian Rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan. Penyelesaian rancangan NSPK dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan. Rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat POA yang siap ditindaklanjuti untuk proses legal drafting.

Gambar 24. Target dan realisasi IKU 14 periode Tahun 2024

Untuk periode TW IV tahun 2024 IKU Persentase penyelesaian rancangan NSPK pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP telah diselesaikan mulai tahap persiapan dengan menyusunan Identifikasi Substansi, Outline, Zero Draft. Tahap pelaksanaan yaitu pembahasan draft, uji publik draft dan draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses legal drafting dan pengesahan selanjutnya tahap pelaporan dengan manyampikan laporan dan draft final kepada Sesditjen PSDKP.

Adapun progress penyusunan NSPK dimaksud telah disusun identifikasi substansi dengan menghasilkan beberapa point sebagai berikut:

1. Rancangan Kepdirjen Standar Kapal Pengawas Kelas IV merupakan perubahan nama usulan rancangan Juknis. Semula: Kepdirjen Tentang Standarisasi Desain Kapal Pengawas dan Spesifikasi Teknis.
2. Penyusunan draft Juknis menunggu pengesahan revisi Permen KP 4/2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas, karena ketentuan kapal pengawas kelas IV ini belum muncul di dalam Permen KP 4 2021

Apabila dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di Tahun 2023, kinerja Tahun 2024 menunjukkan hasil yang sama dengan pencapaian IKU mencapai 100%. Selain itu, capaian Renstra 2020-2024 tidak dapat dibandingkan untuk indikator tersebut karena tidak ditargetkan pada periode renstra tersebut.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Tingginya komitmen Direktur POA dalam pemenuhan regulasi di bidang Prasarana dan Sarana. Hal ini karena pimpinan sangat memahami pentingnya/urgensi keberadaan norma, standar, pedoman dan kriteria dalam menjamin operasional sistem pemantauan SDKP berjalan sesuai kaidah dan standar yang tinggi.
2. Penetapan target NSPK yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya IKU 9 ini sebesar Rp500.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp412.684.206,- atau sebesar 82.53% dengan pagu blokir Rp80.000.000,-

15 Inovasi yang dihasilkan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada

Indikator ini merupakan inovasi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung program peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.7/2021, Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Gambar 25. Target dan realisasi IKU-15 periode TW IV Tahun 2024

Berdasarkan gambar di atas, hingga akhir Triwulan IV Tahun 2024, terdapat inovasi yang dihasilkan oleh unit kerja berupa *SOLAR* (Sarana Otomatisasi Pengelolaan Logistik Akuntabel dan Real-Time). Selain itu, inovasi juga tercipta di tingkat perorangan, di mana pegawai Direktorat POA menghasilkan inovasi bernama *KARTU SAKTI* (SPJ Akurat Kilat Anti Ribet), yang memberikan solusi praktis dan efisien dalam pengelolaan pertanggungjawaban keuangan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam ide/gagasan baru untuk selalu membuat inovasi tahunan agar kinerja menadi lebih baik dari sebelumnya; dan
2. Melakukan rapat internal untuk pelaksanaan pembuatan inovasi perubahan setiap tahunnya.
3. Melakukan tahapan-tahapan penunjang dalam menggali ide/gagasan agar sesuai dengan kebutuhan.

SASARAN KEGIATAN 5

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK LINGKUP DITJEN PSDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA

- Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.
- Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (IV) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.
- Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Gambar 26. Target dan Realisasi IKU 16 Periode TW IV Tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas, realisasi capaian pada TW IV Tahun 2024 dicapai dengan maksimal sesuai target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 100 dengan persentase capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2023, capaian sama dengan persentase 100%. Untuk target Renstra 2020-2024 tidak dapat dibandingkan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Resiko lingkup Direktorat POA; dan
2. Pemantauan Pengendalian Manajemen Resiko yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

17 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada

Profesional ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:

- Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)
- Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:

Pejabat Struktural:

DIKLAT PIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) SEMINAR: Pernah ikut (Nilai10), tidak pernah (nilai0)

Pejabat Fungsional Tertentu:

DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)

Pejabat Fungsional Umum/ Staf:
DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)

- ASN Struktural :
  (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20oj+Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
- ASN Fungsional :
  (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatfungsional+Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
- ASN Staff:
  (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)

Gambar 27. Target dan Realisasi IKU-17 Periode TW IV Tahun 2024

Berdasarkan gambar di atas, realisasi capaian pada periode TW IV teralisasi sebesar 91.39 terjadi sedikit peningkatan dari capaian tahun 2023 sebesar 0.16. Adapun tidak ada target akhir Renstra PSDKP 2020-2024.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Direktur POA sangat fokus dalam hal pemenuhan nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA;
2. Kesadaran yang tinggi pegawai Dit POA dalam pengembangan diri yang dilakukan secara daring maupun luring dengan pelaksanaan vitual class POA; dan
3. Pemenuhan IP ASN yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

18 Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/Daerah.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP.

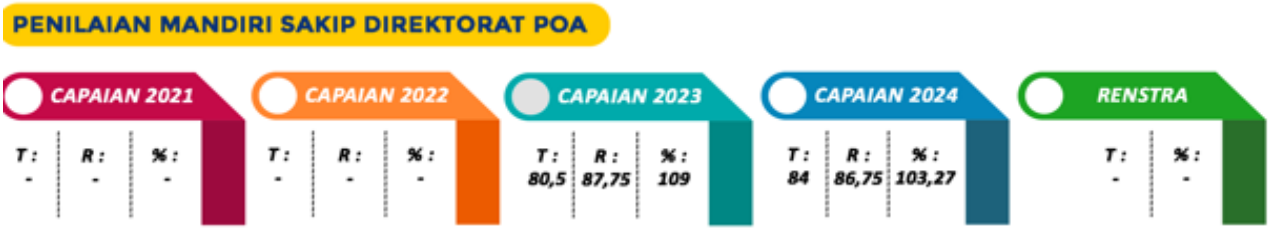

Gambar 28. Target dan realisasi IKU 18 periode TW IV Tahun 2024

Sampai dengan akhir Triwulan IV 2024 IKU teralisasi 86.75 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaiantahun 2023 sebesar 87.75. Hal ini disebabkan karena konsistensi IKU di masa periode renstra terjadi penambahan target kinerja dan perubahan jumlah IKU yang sangat berpengaruh pada hasil capaian nilai kinerja organisasi.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal capaian nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengendalian Operasi Armada; dan
- Melakukan penilaian mandiri pada Lembar Kerja Evaluasi, dan memenuhi data dukung yang sudah ditetapkan.

19 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

IKU ini menunjukan Persentase Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat POA berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPSDKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan

efektivitas sistem pengendalian intern.

Gambar 29. Target dan realisasi IKU 19 periode TW IV Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” bila dibandingkan dengan Tahun 2023 realisasi capaian sama yaitu 100% atau keseluruhan telah ditindaklanjuti (**Tuntas**). Pada Tahun tahun 2024, capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan dengan realisasi 125% dari target. Untuk mencapai keberhasilan IKU ini dipengaruhi oleh adanya perintah direktif pimpinan untuk segera melakukan tindak lanjut setiap rekomendasi yang ada dan senantiasa dilakukan pemantauan secara berkala. Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa memenuhi target dan memastikan tidak terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti atau berstatus proses berdasarkan laporan perhitungan hasil temuan Inspektorat Jenderal.

20 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Indikator ini merupakan IKU baru di Tahun 2023, Nilai Implementasi Program Budaya Kerja tingkat Ditjen PSDKP dan dilanjutkan pada tahun 2024 diperoleh dari:

- Nilai berdasarkan LKE pelaksanaan Budaya Kerja Seluruh Satker Pusat (5 Satker) dan Satker UPT (14 Satker)
- Nilai LKE yang digunakan adalah nilai tanpa dikonversi ke persentase Target nilai
- Satker Pusat minimal 70 dihitung pada akhir tahun.

Gambar 30. Rincian target dan realisasi IKU-20 periode TW IV Tahun 2024

Pengukuran dilakukan pada periode Triwulan IV Tahun 2024 dengan realisasi sebesar 80.42 dan terjadi kenaikan signifikan dari realisasi pada tahun 2023. Hal ini adanya penekanan pada kriteria-kriteria yang ada dalam LKE Budaya Kerja dengan bobot lebih tinggi terutama pada program Inovasi (HIU) Direktorat POA mendapatkan Juara 3 kategori Inovasi Unit Kerja dan Juara 1 Kategori Perorangan (sumbang saran).

Pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada sesudah adanya penerapan program budaya kerja telah terjadi perubahan pola pikir dan cara kerja melalui budaya kerja yang diarahkan untuk menghasilkan inovasi pada setiap area perubahan, karena terdapat lingkungan strategis yang berubah menghasilkan terobosan dalam melakukan kegiatan. Langkah implementasi 11 (sebelas) program budaya kerja pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada yang mendukung dalam pencapaian IKU Implementasi Budaya Kerja adalah:

- Hasilkan Inovasi Satker (HIU) : Melakukan asistensi kepada untuk menghasilkan inovasi pada lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada
- Lima Menit Sebelum Jadwal Rapat : Mencantumkan pada surat undangan agar peserta hadir 5 (lima) menit sebelum rapat
- Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R): Melakukan internalisasi budaya 5R agar ruang kerja lebih rapih
- Upayakan Data Terkini (UPDATE) : Pada saat rapat pimpinan terdapat unit kerja yang menyampaikan paparan dengan menggunakan data pengawasan atau data penangkapan kapal ilegal yang periode lampau, maka dengan adanya program ini tiap pegawai telah melakukan usaha terkini untuk mendapatkan data yang UPDATE.
- Organisasikan Rapat, Catat, Aksi, dan Arsipkan (ORCA) : Pada saat kegiatan temu teknis aparat penegak hukum terdapat agenda yang belum rapi terjadwal, notulen dan pendokumentasian yang masih berantakan, dengan adanya program ORCA kegiatan menjadi lebih komprehensif melalui pencatatan dan pengarsipan notula.
- Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT) : Dalam pelaksanaan tugas adanya potensi untuk melakukan korupsi, menerima suap, menerima gratifikasi dan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan hukum, maka dengan adanya program TAAT ini telah mewujudkan pegawai yang berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugas sehingga menjaga nama baik organisasi dan kepercayaan publik
- Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA) : Pada saat penyusunan anggaran terdapat kesan dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan tidak sesuai ketentuan, maka dengan adanya program BARRAKUDA ini tiap pegawai telah merencanakan anggaran sesuai kaidah perencanaan dan penganggaran sehingga terjadi peningkatan kualitas DIPA dan meminimalisir temuan auditor.
- ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK) : Pada saat jam kerja terdapat pegawai yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak fokus, maka dengan adanya program APIK ini setiap pegawai telah bertanggungjawab dan mempunyai akuntabilitas terhadap pekerjaannya dengan meminimalisir hal-hal yang dapat menganggu fokus kerjanya.
- Menyelesaikan Tugas Dengan Tepat (MANTAP) : Terdapat penyelesaian tugas oleh pegawai atau suatu unit kerja yang terlambat dan tidak tepat waktu, serta mempengaruhi kinerja unit kerja lain, maka dengan adanya program MANTAP ini maka telah tumbuh komitmen kesadaran untuk menghasilkan pekerjaan dengan kualitas tinggi dan diselesaikan secara tepat waktu.

- Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (HARMONIS) : Kurangnya kesadaran dalam memberi penghargaan dan apresiasi mengakibatkan motivasi dan hubungan sesama pegawai menjadi kurang optimal, maka dengan adanya program HARMONIS ini telah mendorong sikap saling menghargai dan apreasiasi terhadap kontribusi kerja pegawai sekecil dan sesederhana apapun dalam pelaksanaan tugas. Terdapat apresiasi Sobat PILAR PSDKP bulanan dan tahunan.

- Gelorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green) : Lingkungan kerja terdapat penggunaan energi yang boros, penggunaan kertas kerja yang banyak, pengunaan air minum dalam kemasan, maka dengan adanya porgram Go Green maka tiap pegawai telah timbul kesadaran untuk melakukan efisiensi dalam hal menghemat penggunaan air dan listrik, mematikan peralatan kerja sebelum pulang, dan mengurangi penggunaan kertas dan tinta dalam memproses dokumen kerja.

21 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA

IKU ini digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh Direktorat POA. Realisasi anggaran yang tinggi juga sejalan dengan tingginya capaian output Direktorat Pengendalian Operasi Armada. Dalam rangka mencapai target realisasi anggaran, dilaksanakan aktivitas pengendalian berupa:

- Memastikan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan Kaidah;
- Memastikan Penyelesaian Kegiatan Kontraktual sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Memastikan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Akuntabel,
- dan Meminimalisir Deviasi halaman IV DIPA.

Gambar 31. Target dan realisasi IKU 21 periode TW IV Tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas, perbandingan realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar 89.33% turun signifikan dari pada realisasi anggaran para tahun 2023. Hal ini disebabkan pagu anggaran pemanfaatan PNBP SDA untuk operasi kapal pengawas sebesar Rp42.548.923.591,- tidak dapat digunakan sampai dengan akhir tahun dan pagu blokir *automatic adjusment*, PHLN dan penghematan perjalanan dinas sebesar Rp39.681.809.000,-

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal capaian Persentase

Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada, dengan melakukan pengusulan drop pagu PHLN dan pemanfaatan PNBP SDA kepada Kementerian Keuangan melalui Sesditjen KKP dan Setjen KKP.

- Melakukan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran; dan
- Membuat rencana penarikan dana serta proyeksi penyerapan sampai dengan akhir tahun.

22 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada

Indikator “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada” merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase unit kerja dalam menerapkan aplikasi manajemen pengetahuan.

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
- Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon II dan Ketua Tim Kerja
- Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon II dan Ketua Tim Kerja.

Gambar 32. Target dan realisasi IKU 22 periode TW IV Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, capaian periode TW IV Tahun 2024 sebesar 133,33% atau 141,84% dari target. Bila dibandingkan dengan TW IV Tahun 2023 capaian realisasi terjadi peningkatan yaitu sebesar 5,3%. Keberhasilan IKU ini dipengaruhi oleh keaktifan dan pimpinan dan ketua tim kerja untuk mengupdate informasi pengetahuan melalui Portal.KKP sesuai arahan pimpinan. Adapun realisasi juga telah tercapai berdasarkan target dalam Renstra 2024. Adapun perbandingan dari nilai capaian IKU tersebut antar Eselon 2 lingkup Ditjen PSDKP ditabulasikan pada gambar berikut:

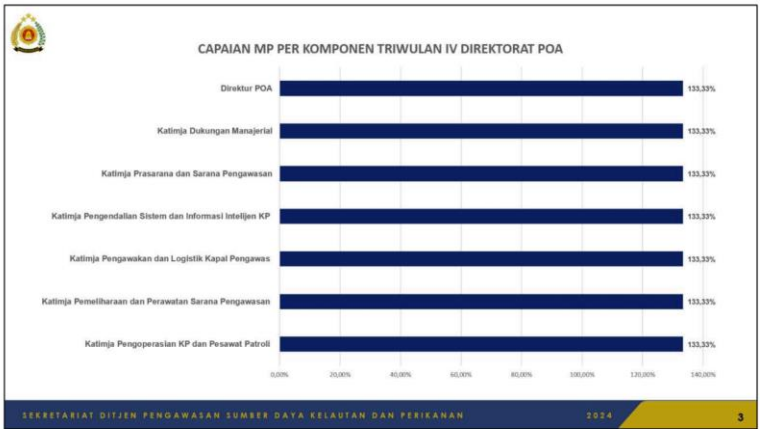

Gambar 33. Capaian MP Direktorat POA Triwulan IV

23 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Tahun 2024.

Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Tahun Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022;
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017- 2019;
- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Gambar 34. Target dan realisasi IKU 23 periode TW IV Tahun 2024

Target IKU atas capaian indikator kinerja kepatuhan pengelolaan BMN Tahun 2024 sebesar 80% dengan realisasi sebesar 100%. Capaian indikator kinerja kepatuhan pengelolaan BMN sama dengan Tahun 2023 sebesar 100%.

Keberhasilan dalam mencapai target kinerja pada tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Komitmen pimpinan dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan BMN; dan
- Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin.

24 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Tahun 2024.

Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE 30%);
- Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); Kesesuaian tahap
- pelaksanaan (30%).

Gambar 35. Target dan realisasi IKU-24 periode TW IV Tahun 2024

Target IKU atas capaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan PBJ Tahun 2024 sebesar 80%, sampai dengan akhir Triwulan IV 2024 capaian indikator kinerja kepatuhan PBJ turun sebesar 4.05% dari Tahun 2023 sebesar 93.48% menjadi 89.42% pada Tahun 2024 dengan tingkat capaian sebesar 117,71% dari target sebesar 80%.

Keberhasilan dalam mencapai target IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Komitmen pimpinan untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- Rapat monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan; dan
- Penerapan Pantau PBJ berupa reminder dan monitoring PBJ sebagai inovasi pada lingkungan Direktorat Pengendalian Operasi Armada.

25 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat POA

Unit kerja yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar komponen penilaian yang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMENPAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah serta Keputusan Inspektur Jenderal KKP Nomor 54 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan KKP. Adapun hasil penilaian Unit kerja yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi oleh Inpektorat Jenderal sebagai berikut

Gambar 36. Target dan realisasi IKU-25 periode TW IV Tahun 2024

Capaian Unit kerja yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal telah melaksanakan penilaian terhadap 14 unit kerja yang diusulkan Eselon I untuk memperoleh Predikat WBK dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Penilaian dilakukan melalui tahapan penilaian lapangan mulai 20 Agustus s.d. 28 September 2024 dan dilanjutkan dengan Pleno TPI KKP pada 14-18 Oktober 2024, dengan nilai sebesar 84.98 atau 113.31%. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan baik periode tahun 2023 maupun periode renstra.

Keberhasilan dalam mencapai target IKU Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat POA pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Komitmen pimpinan untuk mengawal dan memenuhi persyaratan agar Direktorat POA mencapai predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
- Rapat monitoring dan evaluasi rutin setiap triwulan.

26 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi :

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

   Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

   - Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
   - Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

   Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

   Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau mewakili nilai guna kesejarahan.

Gambar 37. Target dan realisasi IKU-26 periode TW IV Tahun 2024

Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP tahun 2024 sebesar 83.29 atau 118.99% yang dilakukan oleh Tim penilai kerarsipan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan baik periode tahun 2023 maupun periode renstra

Keberhasilan dalam mencapai target IKU pada tahun 2024 adalah komitmen pimpinan dalam mengembangkan SDM Pengelola Arsiparis Dit POA agar terciptanya Arsiparis yang dinamis.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

A. Realisasi Anggaran

Di bidang anggaran, Direktorat POA sampai dengan TW IV tahun 2024 telah melaksanakan 8 Rincian Output (RO) Kegiatan Pengendalian Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan dalam DIPA Satker Direktorat POA, Ditjen PSDKP tahun 2024. Pagu Direktorat POA sebesar Rp445,134,101,000 (empat ratus empat puluh lima miliar serratus tiga puluh empat juta serratus satu ribu rupiah). Realisasi anggaran Direktorat POA pada TW IV Tahun Tahun 2024 sebesar Rp362.186.170.641 (tiga ratus enam puluh dua miliar serratus delapan puluh enam juta serratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) atau sebesar 89.33% dari Pagu anggaran dengan pagu anggaran blokir PNBP SDA sebesar Rp42.5548.923.591,- pagu blokir AA, PHLN dan Penghematan Perjalanan Dinas R.39.681.809.00,-. Sehingga pagu efektif Direktorat POA sebesar Rp.405.452.292.000,-

Tabel 12. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA TW IV Tahun 2024

KRO	Rincian Output	Pagu	Realisasi	%
2350.ACA	001 - Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	2,129,972,000	2,121,919,716	99.62 %
2350.AFA	001 - NSPK Pemantauan dan Operasi Armada	420,000,000	418,589,306	99.66 %
2350.BKB	011 - Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang Dipantau	632,858,000	620,472,190	98.04 %
2350.BKB	012 - Operasional Pembinaan POKMASWAS yang Dipantau	911,012,000	908,825,056	99.76 %
2350.QHD	001 - Operasi Kapal Pengawas	321,012,324,000	277,802,639,988	86.54 %
2350.QHD	002 - Operasi Pesawat Patroli	49,512,400,000	49,510,767,251	100.00%
2350.RAL	001 - Kapal Pengawas	30,000,000,000	-	0.00%
2350.RCG	001 - Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	24,905,504,000	24,888,390,022	99.93%
2350.RDS	001 - Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	5,928,222,000	5,914,567,112	99.77%
TOTAL		**405,452,292,000**	**362,186,170,641**	**89,33%**

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Direktorat Pengendalian Operasi Armada selalu berupaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2024, Direktorat Pengendalian Operasi Armada dinilai cukup efektif dalam menggunakan sumber daya. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 110.83% (Kriteria: Istimewa), sedangkan anggaran yang digunakan terealisasi sebesar 89.33%.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengendalian Operasi Armada telah melaksanakan beberapa hal antara lain: (1) memaksimalkan kinerja operasi melalui Pesawat Patroli Udara (*airborne surveillance*) untuk memberikan target operasi terverifikasi. Pola ini dikenal dengan istilah *intercept*. Pola ini memberikan target yang jelas kepada Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan di laut, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak kapal pengawas. (2) melakukan rapat-rapat koordinasi secara virtual sehingga mampu meminimalkan pengeluaran biaya. (3) mengurangi penggunaan kertas dan dokumen tercetak sehingga mampu mengurangi biaya operasional perkantoran.

C. Analisis Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Direktorat Pengendalian Operasi Armada melaksanakan beberapa kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja di tahun 2024:

- Aspek Operasi Armada
  Berpartisipasi dalam kegiatan operasi bersama baik dalam dan luar negeri seperti Gannet Ausindo, Patkor Optima Malindo, Operasi Interdiksi BNN, Operasi Bersama Bakamla, Operasi Bersama Pengawasan dan Penindakan Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL), dan lain lain. Selain itu, pola operasi *integrated surveillance system* (ISS) mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi.
- Aspek Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP
  Melakukan koordinasi/pengendalian rutin dengan pihak terkait, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kapal pengawas dengan skema PHLN. Selain itu, senantiasa proaktif dalam menyediakan dokumen pendukung dalam proses bukan blokir anggaran.
- Aspek Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas
  Optimalisasi penggunaan teknologi dalam memenuhi dan melakukan monitoring penggunaan logistik kapal pengawas. Hal tersebut mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan.
- Aspek Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP
  Pada tahun 2024, dilaksanakan akan dilaksanakan penilaian kondisi sarana

pengawasan SDKP oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) untuk mengetahui kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan, untuk itu Direktorat POA telah menyiapkan rencana pelaksanaan penilaian. Selain itu, optimalisasi peran Port Engineer (PE) dan melakukan evaluasi kinerjanya. Peran PE diharapkan mampu memberikan deteksi dini terkait kerusakan kapal pengawas dan transfer pengetahuan dalam konteks pemeliharaan kapal pengawas secara tepat untuk meminimalisir kerusakan yang lebih fatal.

- Aspek Sistem dan Informasi Intelijen SDKP
  Pengembangan sistem pemantauan SDKP secara berkesinambungan dan peningkatan pemahaman pengguna aplikasi melalui Bimtek dapat meningkatkan keandalan operasional sistem pemantauan SDKP dalam memberikan data dan informasi.
- POA Virtual Class
  Direktorat Pengendalian Operasi Armada secara berkesinambungan melaksanakan POA Virtual Class berupa inhouse training secara daring maupun luring dalam rangka meningkatkan kapasitas personel serta sharing knowledge untuk meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

D. Penghargaan Direktorat tPOA

Sepanjang tahun 2024, Direktorat POA telah berhasil mencatatkan berbagai pencapaian membanggakan dengan diraihnya sejumlah penghargaan bergengsi di berbagai bidang. Penghargaan-penghargaan ini menjadi bukti nyata atas dedikasi, profesionalisme, dan kerja keras seluruh tim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Berbagai apresiasi yang diterima meliputi penghargaan di bidang inovasi, pencapaian kinerja terbaik, serta kontribusi dalam mendorong efisiensi dan efektivitas operasional pengendalian operasi armada.

Tidak hanya itu, penghargaan ini juga mencerminkan komitmen Direktorat POA untuk terus berinovasi dan menjaga kualitas layanan yang prima. Setiap pengakuan yang diraih menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan standar kinerja, memperkuat sinergi, serta memberikan kontribusi positif bagi organisasi secara keseluruhan. Penghargaan sepanjang tahun 2024 ini bukan hanya menjadi prestasi semata, tetapi juga menjadi refleksi atas nilai-nilai kerja sama, integritas, dan semangat untuk terus melangkah maju demi mencapai keberlanjutan di masa mendatang.

Gambar 38. Daftar penghargaan baik dari KKP maupun Instansi Luar KKP

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

1. Nilai capaian kinerja rata-rata Direktorat POA periode TW IV Tahun 2024 sebesar 110.83% dengan realisasi anggaran yang digunakan dalam mencapai kinerja tersebut, yaitu sebesar Rp Rp362.186.170.641 (89.33%).
2. Jumlah Indikator Kinerja Direktorat POA tahun 2024 adalah sejumlah 26 indikator kinerja. Dari target 26 Indikator Kinerja tersebut, sejumlah 21 Indikator Kinerja tercapai di atas target pada TW IV. Hal tersebut menunjukan efektifitas dan efisiensi Direktorat Pengendalian Operasi Armada dalam mencapai target kinerja yang diberikan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis data yang disajikan pada Laporan Kinerja Direktorat POA TW III tahun 2024, telah berjalan dalam rel yang benar. Hanya saja tentu masih perlu penyempurnaan pada periode Triwulan IV 2024. Beberapa hal yang perlu menjadi rekomendasi dalam rangka pelaksanaan penyusunan kinerja TW IV tahun 2024, yakni sebagai berikut:

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Memastikan seluruh Indikator Kinerja lingkup Direktorat POA tercapai sesuai target yang ditetapkan khususnya untuk kinerja yang pengukurannya di akhir tahun	Konsisten melakukan evaluasi secara berkala melibatkan penanggungjawab IKU pada level Tim Kerja lingkup Direktorat POA
Memaksimalkan alokasi anggaran pada Operasi Kapal Pengawas karena keterbatasan anggaran dalam memenuhi target Output dikarenakan adanya Blokir Anggaran baik AA maupun MP PNPB	Pengajuan Drop Pagu PHLN dan Pemanfataan PNBP SDA yang tidak dapat digunakan kepada Kementerian Keuangan

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
WEBSITE : www.kkp.go.id/djpsdkp EMAIL : ditjenpsdkp@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Saiful Umam**

Jabatan : Direktur Pengendalian Operasi Armada

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Pung Nugroho Saksono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 November 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Pengendalian Operasi Armada
Pung Nugroho Saksono	Saiful Umam

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas (Nilai)	81
2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat	2	Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (Indeks)	81
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Indeks)	81
		4	Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Bidang Pemantauan SDKP (%)	80
3	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	5	Indeks kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	94
		6	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91
		7	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
		8	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (Indeks)	79
		9	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Operasi Armada Pengawasan SDKP (%)	100
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketetuan	10	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	0,5
		11	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Indeks)	100
		12	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Nilai)	81
		13	Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (Nilai)	81
		14	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP (%)	100
		15	Inovasi yang dihasilkan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada (Inovasi)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA	16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA (%)	100
		17	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	82
		18	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA (Nilai)	84
		19	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		20	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70
		21	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA (%)	87,5
		22	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	94
		23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA (%)	80
		24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA (%)	80
		25	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat POA (Nilai)	75
		26	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (Nilai)	70

NO	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	445.134.101.000
SK 1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	
SK 1.2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat	
SK 1.3	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	
SK 1.4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketetuan	
SK 1.5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA	
Total Anggaran		445.134.101.000

Jakarta, 5 November 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

Pihak Pertama
Direktur Pengendalian Operasi Armada

Saiful Umam

Lampiran 2 Rincian Hasil Operasi Pesawat Patroli

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM^2)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
I	3 - 6 Januari 2024	4	712	11305.6	Operasi Mandiri	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
I-A	12 - 19 Januari 2024	12	716, 717, 572, 571, 715, 714	106296	KP. HIU 12, KP. HIU 01	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30GT terhadap SPKP. 2. Penerusan informasi keberadaan aktivitas Kapal Ikan Asing di Laut Sulawesi

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM^2)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
						3. Penerusan informasi aktivitas kapal trawl di perairan Sibolga 4. Pemantauan objek kelautan meliputi 2 KPPN, 4 Pulau-Pulau Kecil Terluar, 7 Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan 1 Objek Lainnya berupa Oil n Gas Field. 5. Update database hasil pemantauan sebagai bahan operasi berikutnya.
II	20 & 29 Februari 2024	2	712	-	Operasi Mandiri	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
II-A	21 Februari – 4 Maret 2024	11	712, 713, 716, 717, 715, 711	153366.4	KP. ORCA 04	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30GT terhadap SPKP dengan status transmitter aktif. 2. Penerusan informasi keberadaan aktivitas Kapal Ikan Asing di Laut Sulawesi kepada Direktorat POA sebagai bahan operasi kapal pengawas. 3. Pemantauan objek kelautan meliputi P. Karimun Jawa, WP3K Pulau Sepanjang, WP3K Pulau BirahBirahan, PPKT P. Mantehage, P. Miangas, P. Marore, TWP Padaido, WP3K P. Ingar, WP3K

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM^2)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
						Banda Neira, WP3K P. Alangtiga, P. Berhala 4. Update database hasil pemantauan sebagai bahan operasi berikutnya.
III	4 Maret 2024	1	712	-	Operasi Mandiri	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
III-A	5 - 23 Maret 2024	13	573, 712, 714, 718, 711	41600	KP. ORCA 05	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30GT terhadap SPKP yakni 15 Kapal Purse Seine di Sektor Operasi 2. Tidak terdapat Kapal Ikan Asing di Laut Natuna Utara (WPPNRI 711). 3. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi. 4. Telah dilaksanakan dukungan kerja pimipinan dengan lancar. 5. Update database hasil pemantauan sebagai bahan operasi berikutnya.
IV	29 Maret - 17 April 2024	14	712, 571, 714, 718	108.269	KP. ORCA 06, KP. PAUS 01, KP. ORCA 04	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30GT terhadap SPKP yakni 1 Kapal Gillnet dan 1 Kapal Purse Seine 2. Telah dilaksanakan pengawasan dan pencarian

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM^2)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
						terhadap kapal IUU Fishing KM. Runzheng 03 dan Runzheng 05 kapal berbendera Rusia. 3. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi. 4. Telah dilaksanakan dukungan kerja pimipinan dengan lancar. 5. Update database hasil pemantauan sebagai bahan operasi berikutnya.
IV-A	18 - 20 April 2024	3	713	-	-	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
IV-B	19 - 20 April 2024 25 April - 3 Mei 2024	7	718, 572	10763.2	KP. ORCA 06, KP. PAUS 01, KP. ORCA 04	1. Telah dilaksanakan pengawasan dan pencarian terhadap kapal IUU Fishing KM. Runzheng 03 dan Runzheng 05 kapal berbendera Rusia. 2. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi. 3. Telah dilaksanakan dukungan kerja pimipinan dengan lancar. 4. Update database hasil pemantauan sebagai bahan operasi berikutnya.

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM^2)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
V	3 Mei 2024	1	712	-	-	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
V-A	6 - 26 Mei 2024	14	573, 718, 712	39763.2	PAUS 01, ORCA 05	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30GT terhadap SPKP yakni 5 Kapal Purse Seine. 2. Telah dilaksanakan dukungan pengawasan operasi bersama Gannet - 8 Ausindo di Perairan laut Indonesia - Australia. 3. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi. 4. Telah dilaksanakan dukungan kerja pimipinan dengan lancar. 5. Telah dilakukan pencarian terhadap KM. Run Zheng 03, dan KP. Paus 01 telah melakukan Ad-hock terhadap KIA berbenbera Rusia tersebut.
VB	19 - 22 Mei 2024		712	-	-	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
VI	29 Mei - 5 Juni 2024		718, 716	-	-	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM^2)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
VI-A	27 Mei - 7 Juni 2024		717, 718, 714, 712, 716	81832	KP. ORCA 04 KP. ORCA 06	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30 GT terhadap SPKP, 1 Kapal Purse Seine (KM. Senang Hati – 10) dan 1 Kapal Squid Jigging (KM. Perintis Jaya) dengan status aktif. 2. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi. 3. Telah dilaksanakan dukungan kerja pimipinan dengan lancar. 4. Telah dilaksanakan dukungan kegiatan misi SAR dalam pencarian kapal nelayan yang hilang di perairan utara Surabaya 5. Telah dilaksanakan dukungan operasi misi intercept kapal KIA Filipina oleh KP Orca 04 dan KP Orca 06
VII-A	22 Juli - 2 Agustus 2024		711, 712, 713, 716	109.609,6	Operasi Mandiri	1. Penerusan informasi keberadaan aktivitas Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Laut Sulawesi kepada Direktorat POA sebagai bahan operasi kapal pengawas. 2. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi.

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM^2)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
						3. Telah dilaksanakan dukungan kerja pimipinan dengan lancar. 4. Laporan Indikasi Pelanggaran di WPPNRI 716, 711 dan 713 telah disampaikan kepada unit terkait untuk dilakukan tindak lanjut
VIII-A	15 - 19 Agustus 2024	4	573	-	Operasi Mandiri	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
IX	1 – 2 September 2024	2	712	-	Operasi Mandiri	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
IX-A	27 Agustus – 19 September 2024	8	572, 714, 713	23.921,6	Operasi Mandiri	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30 GT terhadap SPKP. 2. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi. 3. Telah dilaksanakan dukungan kerja pimipinan dengan lancar. 4. Update database hasil pemantauan sebagai bahan operasi berikutnya.
IX-B	12 – 13 September 2024	2	713	-	Operasi Mandiri	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM^2)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
X	21 September - 19 Oktober 2024	14	712	11537,6	Operasi Mandiri	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30 GT terhadap SPKP. 2. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi. 3. Telah dilaksanakan dukungan kerja MKP dengan lancar. 4. Update database hasil pemantauan sebagai bahan operasi berikutnya.
XI	26 Oktober - 5 November & 11 Desember 2024	7	714, 713, 718	MPA ATR 42-300 PK-YRE	Operasi Mandiri	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30 GT terhadap SPKP. 2. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi. 3. Telah dilaksanakan dukungan kerja MKP dengan lancar. 4. Update database hasil pemantauan sebagai bahan operasi berikutnya.
XI-A	14 - 23 November 2024	7	712, 711	MPA ATR 42-300 PK-YRE	Operasi Mandiri	1. Validasi Kepatuhan Kapal Perikanan >30 GT terhadap SPKP. 2. Tidak terjadi pelanggaran pada hasil pemantauan objek kelautan di area operasi. 3. Telah dilaksanakan dukungan kerja MKP

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM^2)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
						dengan lancar. 4. Update database hasil pemantauan sebagai bahan operasi berikutnya.
XII	10 - 11Desember 2024	1	712	Beechcraft King 350i PK - CAQ	Operasi Mandiri	Dukungan kegiatan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan berjalan dengan lancar
Total Hari Operasi		**191**	**Total Coverage Area (NM2)**	**928.127**		

Lampiran 3 Daftar kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas

No	Kapal Pengawas	Jenis Target Perawatan		
		Preventif	Prediktif	Darurat
1	KP. Orca 01	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan April 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk MTU	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Penggantian AVR Leroy Somer R450 Generator AE Kiri
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Mei 2024	Pengadaan Suku Cadang Insert Element Pre Fuel Filter	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Perbaikan Crane Kanan
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Juni 2024	Pengadaan Suku Cadang Gear Box	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Perbaikan Mesin Bantu Kiri
			Pengiriman suku cadang mesin tempel Yamaha di RIB	
			Pengiriman suku cadang mesin bantu CATERPILLAR C4.4, suku cadang Gear Box ZF 9300, suku cadang BP-Filters, dan suku cadang mesin induk MTU 16V4000M73	

No	Kapal Pengawas	Jenis Target Perawatan		
		Preventif	Prediktif	Darurat
2	KP. Orca 02	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan April 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk MTU	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Perbaikan RIB Kanan
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Mei 2024	Pengadaan Suku Cadang Insert Element Pre Fuel Filter	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Perbaikan RIB Kiri
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Juni 2024	Pengadaan Suku Cadang Gear Box	
3	KP. Orca 03	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan April 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk MTU	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Penggantian ACCU Battery
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Mei 2024	Pengadaan Suku Cadang Insert Element Pre Fuel Filter	
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Juni 2024	Pengadaan Suku Cadang Gear Box	
			Pengiriman suku cadang mesin bantu Caterpillar C9 dan C4.4, suku cadang mesin bantu Volvo, dan suku cadang mesin induk MAN	
			Pengadaan perlengkapan Kapal Pengawas 60 meter dalam rangka pembelian AC Panasonic 2 PK dan 1 PK	
4	KP. Orca 04	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan April 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk MTU	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Instalasi Sistem Gas Buang Mesin Induk Kanan
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Mei 2024	Pengadaan Suku Cadang Insert Element Pre Fuel Filter	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Penggantian MCB dan CBC
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Juni 2024	Pengadaan Suku Cadang Gear Box	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Perbaikan As Hydrolik
		Pembuatan Repair List Docking KP. Orca 04	Pengiriman suku cadang mesin bantu Caterpillar C9	

No	Kapal Pengawas	Jenis Target Perawatan		
		Preventif	Prediktif	Darurat
		Servis Perlengkapan Keselamatan Liferaft Kapal Pengawas	Pengiriman suku cadang mesin bantu CATERPILLAR C4.4, suku cadang Gear Box ZF 9300, suku cadang BP-Filters, dan suku cadang mesin induk MTU 16V4000M73	
		Servis Perlengkapan Pemadam Kebakaran (PMK) Kapal Pengawas		
5	KP. Orca 05	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan April 2024	Pengadaan Suku Cadang Insert Element Pre Fuel Filter	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Pengadaan Freon Kapal Pengawas
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Mei 2024	Pengadaan Suku Cadang Gear Box	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Pembuatan Dampra Sponge Karet
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Juni 2024	Pengadaan perlengkapan Kapal Pengawas 60 meter dalam rangka pengadaan GoPro 12 dan Icom VHF Marine	
6	KP. Orca 06	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan April 2024	Pengadaan Suku Cadang Insert Element Pre Fuel Filter	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Pembuatan Dampra Sponge Karet
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Mei 2024	Pengadaan Suku Cadang Gear Box	
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Juni 2024	Pengadaan perlengkapan Kapal Pengawas 60 meter dalam rangka pengadaan GoPro 12 dan Icom VHF Marine	
7	KP. Barakuda 01	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan April 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Bantu Volvo	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 50 Meter Dalam Rangka Pembuatan Dampra Sponge Karet
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Mei 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk MAN	
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Juni 2024	Pengadaan Suku Cadang Insert Element Pre Fuel Filter	
			Pengadaan Suku Cadang Gear Box	

No	Kapal Pengawas	Jenis Target Perawatan		
		Preventif	Prediktif	Darurat
			Pengiriman suku cadang mesin bantu Caterpillar C9 dan C4.4, suku cadang mesin bantu Volvo, dan suku cadang mesin induk MAN	
			Pengiriman suku cadang mesin induk CATERPILLAR 3516 B, mesin bantu PERKINS 1006 TG 2 AM, suku cadang BP-Filters dan suku cadang perpompaan	
			Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas 50 Meter Dalam Rangka Pembelian HT ICOM M-37 Marine	
			Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas 50 Meter Dalam Rangka Pembelian Polytron Showcase SCN 230L & 180L	
8	KP. Barakuda 02	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan April 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Bantu Volvo	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 50 Meter Dalam Rangka Pembuatan Dampra Sponge Karet
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Mei 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk MAN	
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Juni 2024	Pengadaan Suku Cadang Insert Element Pre Fuel Filter	
			Pengadaan Suku Cadang Gear Box	
			Pengiriman suku cadang mesin bantu Volvo dan suku cadang sistem perpompaan	
			Pengiriman suku cadang mesin bantu Volvo	
			Pengiriman suku cadang mesin bantu Caterpillar C9 dan C4.4, suku cadang mesin bantu Volvo, dan suku cadang mesin induk MAN	
			Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas 50 Meter Dalam Rangka Pembelian HT ICOM M-37 Marine	

No	Kapal Pengawas	Jenis Target Perawatan		
		Preventif	Prediktif	Darurat
			Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas 50 Meter Dalam Rangka Pembelian Chest Freezer GEA Qb 1200 dan Polytron Showcase SCN 237	
9	KP. Hiu Macan Tutul 01	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan April 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk Cummins	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 42 Meter Dalam Rangka Pengadaan Suku Cadang Generator
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Mei 2024	Pengadaan Suku Cadang Insert Element Pre Fuel Filter	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 42 Meter Dalam Rangka Perbaikan Dinamo Blower
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Juni 2024	Pengadaan Suku Cadang Gear Box	
		Servis Perlengkapan Keselamatan Liferaft Kapal Pengawas	Pengiriman suku cadang mesin bantu CUMMINS 6BT5.9-DM, suku cadang mesin bantu CATERPILLAR C4.4, dan suku cadang BP-Filters	
		Servis Perlengkapan Pemadam Kebakaran (PMK) Kapal Pengawas		
		Servis Gyro Compass		
10	KP. Hiu Macan Tutul 02	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan April 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk Caterpillar	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 42 Meter Dalam Rangka Cleaning Dynamo Mesin Bantu
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Mei 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Bantu Cummins	
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Juni 2024	Pengadaan Suku Cadang Insert Element Pre Fuel Filter	
		Servis Perlengkapan Keselamatan Dalam Rangka Penggantian New Supply Liferaft Kapasitas 20 Person	Pengadaan Suku Cadang Gear Box	
			Pengiriman suku cadang mesin bantu CUMMINS 6BT5.9-DM	

No	Kapal Pengawas	Jenis Target Perawatan		
		Preventif	Prediktif	Darurat
			Pengiriman suku cadang mesin induk CATERPILLAR 3516 B, mesin bantu PERKINS 1006 TG 2 AM, suku cadang BP-Filters dan suku cadang perpompaan	
11	KP. Paus 01	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan April 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk Guascor	
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Mei 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Bantu Baudouin	
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Juni 2024	Pengadaan Suku Cadang Insert Element Pre Fuel Filter	
		Pembuatan Repair List Docking KP. Paus 01	Pengadaan Suku Cadang Gear Box	
		Servis Perlengkapan Keselamatan dan Pemadam Kebakaran Kapal Pengawas	Pengiriman suku cadang mesin bantu Baudouin dan suku cadang penyaring bahan bakar BP Filter	
12	KP. Akar Bahar 01	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan April 2024	Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk Yanmar	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 14 Meter Dalam Rangka Penggantian Marine Air Conditioner
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Mei 2024	Pengadaan Suku Cadang Insert Element Pre Fuel Filter	
		Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Bulan Juni 2024		